



# LAPORAN KINERJA SEMESTER I TAHUN 2020

Sekretariat Kementerian Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Kegiatan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Semester I 2020. Laporan ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam hal pencapaian visi dan misi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja TA. 2020.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Semester I 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Tahun 2015-2019. Laporan Kinerja didasarkan pada target kinerja pada sebuah instansi yang telah dinyatakan dalam dokumen perjanjian kinerja. Perubahan SOTK telah menyebabkan banyaknya hal yang harus disesuaikan termasuk juga perjanjian kinerja dikarenakan terdapat penambahan unit. Sehingga mayoritas target kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ditargetkan pada triwulan akhir (triwulan IV)

Dalam Laporan ini disampaikan hasil dan penjelasan kegiatan pada Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang meliputi Biro Perencanaan dan Informasi, Biro Umum, Biro Hukum, serta capaian kinerja Inspektorat dan mayoritas merupakan progres kegiatan per unit pada Sekretariat Kementerian Koordinator.

Dengan tersusunnya laporan Semester I 2020 ini diharapkan akan semakin memberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai perkembangan dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peningkatan kinerja organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kami menyadari bahwa laporan ini belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang konstruktif untuk peningkatan kualitas pelaporan kedepannya.

Jakarta, Juli 2020  
Sekretaris Kementerian Koordinator,

**Agung Kuswandono**

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	0
DAFTAR ISI.....	1
DAFTAR TABEL.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR GAMBAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
I. PENDAHULUAN .....	4
1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi .....	4
1.2 Organisasi dan Personalia .....	5
II. ISU/KEBIJAKAN YANG BERKEMBANG.....	7
III. PELAKSANAAN KEGIATAN .....	9
3. 1 Perencanaan dan Pengembangan Pegawai .....	9
1. Wawancara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi .....	9
2. <i>Coaching</i> Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN .....	10
3. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Penyederhanaan Birokrasi) .....	10
3. 2 Pengelolaan Keuangan.....	11
1. Pembahasan Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 5 Tahun 2020 .....	11
2. Penyamaan Persepsi Internal Bagian Keuangan mengenai SK KPA Nomor 19/KPA Tahun 2020 .....	11
3. 3 Pengelolaan Arsip dan Persuratan .....	12
1. Pengawasan Kearsipan Tahun 2020 .....	12
3. 4 Layanan Organisasi dan Kerumahtanggaan .....	13
1. Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Tahap 1 di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	13
2. Kegiatan Marves Peduli .....	13
3. 5 Penyusunan Dokumen Program.....	13
1. Pembahasan Lanjutan Rencana Strategis dan IKU dan SS Deputi .....	13
2. Finalisasi Peta Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi .....	14
3. Pembahasan Penghematan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020 .....	14
3. 6 Pemantauan dan Evaluasi.....	15
1. Tindak Lanjut Koordinasi Area Manajemen Perubahan dan Area Akuntabilitas terkait Rencana Aksi RB dalam Mewujudkan Tukin 80% .....	15

2.	Finalisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator, Pembaharuan PK Inspektur dan Eselon II lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator .....	16
3. 7	Pelaporan Kinerja.....	16
1.	Koordinasi Mekanisme Penyampaian Pelaporan Kegiatan dan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pasca perubahan SOTK.....	16
3. 8	Dukungan Sistem Akuntabilitas Kinerja .....	17
1.	Sosialisasi Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA .....	17
3. 9	Dukungan Kebijakan Strategis .....	18
1.	Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins Kemenko Maritim Tahun 2019 dan Penyusunan Quick Wins Kemenko Marves Tahun 2020.....	18
3. 10	Penyiapan Bahan Persidangan.....	20
3. 11	Perumusan Hasil Persidangan .....	25
3. 12	Pengelolaan Sistem Informasi.....	29
1.	Pembahasan Penggunaan Aplikasi SEMARVES Sebagai Nota Dinas Elektronik.....	29
2.	Pembahasan Draft PK Sekretaris Kementerian Koordinator terkait dengan Layanan Data dan Sistem Informasi.....	29
3. 13	Pengelolaan Opini Publik .....	29
1.	Laporan Media Monitoring.....	29
2.	Pembangunan Konten .....	31
3.	Penayangan Pada Media .....	32
3. 14	Publikasi dan Dokumentasi .....	33
3. 15	Perancangan Peraturan Perundang-undangan .....	34
1.	Pembahasan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020 .....	34
2.	<i>Progress Report</i> Perancangan Peraturan Perundang-undangan.....	34
3.	Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Kemenko Marves.....	35
4.	Koordinasi Finalisasi Kepmenko tentang Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI).....	35
5.	Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi .....	36
3. 16	Pengelolaan Kerja Sama .....	36
1.	Pembahasan Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi.....	36
2.	Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkup Kemenko Marves .....	37
3.	Persiapan Implementasi Kerja Sama Indonesia dengan UEA.....	37
4.	FGD Skema Dana Hibah dari Bank Dunia .....	38
3. 17	Penataan Organisasi.....	38

1.	Penyederhanaan Birokrasi Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	38
3. 18	Penataan Tata Laksana .....	39
1.	Pemantauan Penerapan Proses Bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.....	39
2.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur .....	39
3.	Sosialisasi Permenko Nomor 4/2020 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenko Marves dan Rapat Mekanisme pelaksanaan monev SOP unit kerja di lingkungan Kemenko Marves .....	40
3. 19	Pengelolaan Reformasi Birokrasi.....	40
1.	Tindaklanjut Rencana Aksi Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi dalam rangka Peyetaraan Tunkin 80% .....	40
3. 20	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur .....	40
1.	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Dokumen Pengawasan .....	40
2.	Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran.....	41
3.	Pemantauan Pengaduan Masyarakat.....	42
3. 21	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional ....	43
1.	Risalah Kebijakan mengenai Pengelolaan Pengetahuan/Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) .....	43
IV.	DUKUNGAN SUMBER DAYA .....	45
V.	PENUTUP .....	46

# I. PENDAHULUAN

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju periode Tahun 2019-2024. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Mengingat Pelaksanaan tugas Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi belum efektif berjalan dikarenakan menunggu pengesahan DIPA yang baru, maka Laporan Sekretariat Bulan Maret ini akan disajikan berdasarkan tugas yang diatur dalam Peraturan Presiden No 10 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 1 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Untuk merealisasikan tugas dan fungsi tersebut, Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, selama periode Maret 2020 telah melakukan beberapa kegiatan. Berbagai kegiatan tersebut diadakan dengan maksud agar dapat membantu dan mengawal tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sehingga target kinerja dapat tercapai.

Sebagai bentuk penyebaran informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan, maka disusunlah laporan kegiatan bulan April 2020. Penyusunan Laporan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi periode Maret 2020 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014. Melalui laporan ini diharapkan dapat menjadi informasi mengenai kinerja Setmenko sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja pada masa yang akan datang.

## 1.1 Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman 1 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Sekretariat Kementerian Koordinator adalah unit organisasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian

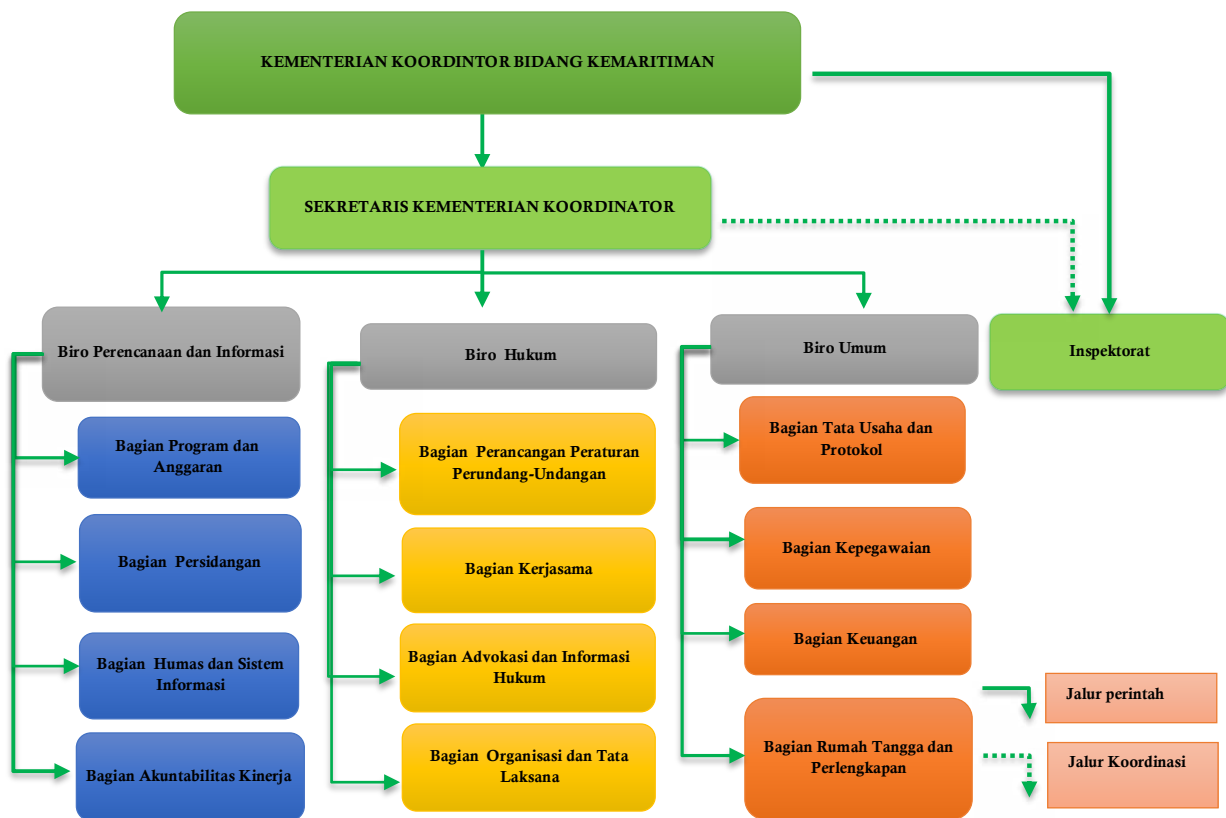
Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Kementerian Koordinator menyelenggarakan fungsi:

1. Koordinasi kegiatan Sekretariat Kemenko Kemaritiman;
2. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman;
4. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

## 1.2 Organisasi dan Personalia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, struktur organisasi Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman terdiri dari:

1. **Biro Perencanaan dan Informasi** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi: penyusunan rencana, program, dan anggaran, pemberian dukungan kebijakan strategis; pengelolaan akuntabilitas kinerja; pengolahan data dan pengelolaan sistem informasi; pelaksanaan hubungan masyarakat; fasilitasi persidangan Menteri Koordinator; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
2. **Biro Hukum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi: penyusunan peraturan perundang-undangan dan hukum; penyiapan naskah perjanjian; penelaahan dan bantuan hukum; pelaksanaan administrasi kerja sama; pemberian dukungan reformasi birokrasi; pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan organisasi serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
3. **Biro Umum** mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan fasilitasi: pengelolaan ketatausahaan; kepegawaian; keuangan; perlengkapan; kerumahtanggaan; persuratan; kearsipan; keprotokolan; pengelolaan barang milik/kekayaan Negara; layanan pengadaan barang/jasa; serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator.
4. **Inspektorat** mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas semua unsur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Inspektorat dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
5. **Staf Ahli Menteri** mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman sesuai keahliannya



Gambar 1 Struktur Organisasi Setmenko

Dalam struktur organisasi Kemenko Bidang Kemaritiman, sesuai dengan Permenko No 1 tahun 2015, Inspektorat di bawah perintah langsung Menteri Koordinator. Namun dalam operasional dan pelaksanaan kegiatan sehari-hari berkoordinasi langsung dengan Sekretaris Kementerian Koordinator. Sehingga dalam penyajian Laporan Kinerja Sekretaris Kementerian ini memasukan capaian kinerja yang dihasilkan/menjadi tanggungjawab Inspektorat.



## II. ISU/KEBIJAKAN YANG BERKEMBANG

### RENCANA KINERJA

Rencana dan target kinerja Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dilihat pada dokument perjanjian Kinerja sebagai berikut:

**TARGET KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG**  
**KEMARITIMAN DAN INVESTASI**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
<b>Stakeholders Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Birokrasi yang Bersih, Akuntabel, dan Kapabel di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	1	Indeks Reformasi Birokrasi Kemenko Marves	75
<b>Customer Perspective</b>				
SS.2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	2	Nilai SAKIP Kemenko Marves	70
SS.3	Tersedianya Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kemaritiman dan Investasi yang Efektif dan Harmonis	3	Nilai Hasil Evaluasi Area Penataan Peraturan Perundang - Undangan	3.5
SS.4	Terwujudnya Layanan Birokrasi yang Modern dan Efektif Berbasis Eelektronik	4	Indeks SPBE	3
SS.5	Tersedianya SDM Aparatur Yang Profesional dan Kompeten	5	Indeks Profesionalitas ASN	71
SS.6	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Baik di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	6	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
SS.7	Terselenggaranya Koordinasi Perencanaan Program & Anggaran serta Peraturan Perundang - Undangan yang Efektif	7	Persentase Tersedianya Dokumen Perencanaan Program yang Sesuai dengan Ketentuan	100
		8	Persentase Peraturan Perundang-Undangan yang Diharmonisasi pada Tahun Berjalan	100
SS.8	Terselenggaranya Pelayanan Kesekretariatan yang Prima	9	Persentase Sistem Layanan Kepegawaian yang Baik	80
		10	Persentase Penyelesaian Tagihan atas Beban Negara yang Tepat Waktu	95

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET TAHUNAN
		11	Persentase Opini Publik yang Positif	70
		12	Persentase Pengadaan Barang & Jasa yang Tepat Waktu	100
SS.9	Tersedianya Dokumen Penyelenggaraan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Baik	13	Jumlah Pedum Manajerial yang Ditetapkan	>=5
SS.10	Terselenggaranya Pengelolaan BMN dan Layanan Sistem Informasi yang Baik	14	Persentase Tingkat Ketaatan Penyampaian Laporan Barang Milik Negara	100
		15	Pemenuhan Kebutuhan Minimal Aplikasi Umum yang Terintegrasi Lingkup Kemenko Marves	4
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
SS.11	Tersedianya SDM yang Kompeten di Setmenko Marves	16	Persentase SDM yang Kompeten	75
SS.12	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Setmenko Marves	17	Nilai PMPRB Setmenko	70
		18	Nilai SAKIP Setmenko	75
SS.13	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Setmenko Marves	19	Nilai IKPA Setmenko	95

Pada pelaksanaan kegiatan tersebut dan karena perubahan SOTK serta pandemi yang terjadi di Indonesia, maka target kinerja mayoritas ditargetkan untuk dicapai pada Triwulan IV. Sehingga apabila Laporan kinerja semester I tahun 2020 ini adalah progres pelaksanaan kegiatan yang mendukung untuk mencapai target kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target kinerja tersebut dilakukan berdasarkan isu kegiatan dan kebijakan yang berkembang serta didasarkan pada Renstra Kemenko.

Dalam Renstra Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman 2015-2019, Sekretaris Kemenko Bidang Kemaritiman bertanggungjawab dalam pencapaian sasaran strategis ke 5 Kemenko Bidang Kemaritiman.

Dalam pelaksanaan kegiatan pada bulan April 2020, beberapa isu prioritas/penting yang menjadi perhatian dan dilaksanakan oleh Setmenko Kemaritiman adalah sebagai berikut:

1. Wawancara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
2. Coaching Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN
3. Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Penyederhanaan Birokrasi)
4. Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Tahap 1 di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
5. Kegiatan Marves Peduli

6. Finalisasi Peta Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi
7. Finalisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator, Pembaharuan PK Inspektur dan Eselon II lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator
8. Koordinasi Mekanisme Penyampaian Pelaporan Kegiatan dan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pasca perubahan SOTK
9. Sosialisasi Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA
10. Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins Kemenko Maritim Tahun 2019 dan Penyusunan Quick Wins Kemenko Marves Tahun 2020
11. Pembahasan Penggunaan Aplikasi SEMARVES Sebagai Nota Dinas Elektronik
12. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Kemenko Marves
13. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkup Kemenko Marves
14. Sosialisasi Permenko Nomor 4/2020 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenko Marves dan Rapat Mekanisme pelaksanaan monev SOP unit kerja di lingkungan Kemenko Marves
15. Risalah Kebijakan mengenai Pengelolaan Pengetahuan/Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)

## III. PELAKSANAAN KEGIATAN

### 3.1 Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

#### 1. Wawancara Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Madya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kegiatan ini bertujuan sebagai tahap akhir dalam rangkaian seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan wawancara dilakukan selama 3 (tiga) hari dengan jumlah peserta sebanyak 29 (dua puluh sembilan) peserta. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan media aplikasi zoom, dimana peserta akan mendapatkan meeting id dan password sebelum tes dimulai.



Berdasarkan pengolahan hasil nilai akhir yang dilakukan oleh Sekretariat Panitia Seleksi, maka menghasilkan daftar 3 (tiga) besar peringkat tertinggi sebagai berikut:

- a. Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan: Nani Hendiarti, Albert Eddy Husin, dan Agus Surono.
- b. Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Odo R.M Manuhutu, Rizal Edwin, dan Taufik Hendra Kusuma.
- c. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan: Septian Hario Seto, Adriyanto, dan J.W Saputro.
- d. Staf Ahli Bidang Hukum Laut: Okto Irianto, Agus Surono, dan Aldrin Dalimunte.

- e. Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas: Sahat Manor Panggabean, Guntur Sakti, dan Rahmi Setiawati.

## 2. *Coaching* Penerapan Sistem Merit dalam Manajemen ASN



Tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam menerapkan sistem merit dalam kebijakan dan manajemen ASN. Capaian Hasil Pelaksanaan Kegiatan tersebut adalah Instansi segera membentuk Tim Penilai Instansi dan menyusun *road map* berdasarkan

Permenpan 40 Tahun 2018 sebagai aspek penilaian penerapan sistem merit. Kemudian melakukan pengisian manajemen aspek yang terdapat pada aplikasi SIPINTER, target Kemenko Marves pada tahun 2020 dengan kategori “baik”. Tim Penilai Instansi yang akan dibentuk dari unit kerja Biro Umum dan Biro Hukum, dapat segera melakukan persiapan membentuk Tim Penilai Instansi yang ditetapkan oleh PPK untuk menyusun *road map* penerapan sistem merit setiap aspek dan menyiapkan dokumen disertai bukti terkait penilaian penerapan sistem merit.

## 3. *Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Penyederhanaan Birokrasi)*

Penyederhanaan birokrasi ini diharapkan dapat memperhatikan aspek kesejahteraan, aspek keuangan, dan aspek karir pegawai. Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Kemenko Marves mengacu kepada Peraturan Menteri PAN-RB No. 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Surat Menteri PAN RB Nomor B/285/M.KT.01/2020 tanggal 27 Februari perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves. Dalam Permen PAN-RB tersebut disebutkan bahwa penyetaraan jabatan sebagaimana perihal dimaksud dilakukan paling lambat 30 Juni 2020.

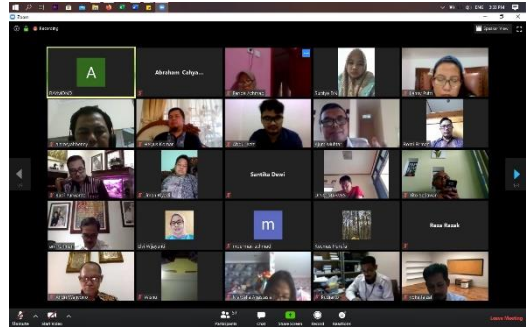
Adapun total jumlah Jabatan Administrasi di lingkungan Kemenko Marves adalah 183 orang yang terdiri dari 117 Jabatan Eselon III dan 66 Jabatan Eselon IV. Saat ini, tim Pelaksana Penyederhanaan Birokrasi telah mengidentifikasi bahwa terdapat 14 jabatan fungsional yang bisa dan berpotensi untuk diisi oleh jabatan Eselon III dan Eselon IV. Tim Penyederhanaan Birokrasi Kemenko Marves terdiri dari Pengarah yaitu Sesmenko dan para Deputi; Penanggung Jawab yaitu Inspektur, para Kepala Biro dan para Sesdep; Pelaksana yaitu Kabag Ortala dan RB, Kabag Kepegawaian, Kabag Keuangan, Kabag Program dan Anggaran, Kabag Administrasi Umum, Kasubag Tata Laksana dan Kasubag Pengelolaan RB. Kemudian Jabatan Eselon III akan dialihkan menjadi Fungsional Ahli Madya dan Eselon IV menjadi Fungsional Ahli Muda, Usulan Jabatan Administrasi yang masih tetap dan akan disampaikan kepada Kementerian PAN-RB untuk unit kerja Setmenko yaitu 1 Jabatan Eselon III yaitu Kabag Protokol dan Rumah Tangga dan 2 Jabatan Eselon IV yaitu

Kasubbag Protokol, Kasubbag Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan, dan Kasubbag Tata Usaha.

### 3.2 Pengelolaan Keuangan

#### 1. Pembahasan Tindak Lanjut Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 5 Tahun 2020

Kegiatan yang dilakukan untuk menyepakati mekanisme pelaksanaan Surat Edaran Sekretaris Kementerian Koordinator Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pemberian Penggantian Biaya Pemakaian Kuota Internet Bagi Para Pegawai sebagai Pengganti Uang Konsumsi Rapat Selama Masa Bekerja dari Rumah di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.



Kegiatan menghasilkan beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

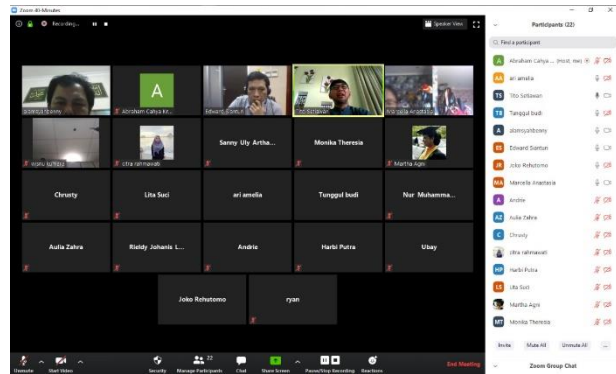
- a. Surat Balasan dari Direktorat Jenderal Anggaran ke Kementerian PAN-RB telah mengizinkan pembayaran narasumber asal sesuai ketentuan SBM selain itu DJA juga mengizinkan pembayaran sebagai pengganti biaya internet rapat selama wabah COVID-19;
- b. Akun yang digunakan adalah sesuai akun Konsumsi Rapat (521211/Belanja Bahan);
- c. Nominal yang disepakati sebagai pengganti biaya internet adalah Rp65.000 yang dibayarkan maksimal satu kali dalam satu hari untuk masing-masing individu;
- d. PPK wajib menjamin masing-masing individu pada unit kerjanya hanya mendapat pembayaran dimaksud maksimal satu kali dalam satu hari dengan mekanisme pembebanan pada PPK masing-masing unit kerja;
- e. Pengajuan Pembayaran paket internet dapat melalui mekanisme LS atau UP;
- f. Format tanda terima uang paket internet menggunakan format RDK dengan bentuk transfer tanpa tanda tangan dan dipandang perlu mengaktifkan Kembali Cash Management System

#### 2. Penyamaan Persepsi Internal Bagian Keuangan mengenai SK KPA Nomor 19/KPA Tahun 2020

Kegiatan ini dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam menerjemahkan maksud dari SK KPA Nomor 19/KPA Tahun 2020 tentang Biaya/Belanja yang Dapat Dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Selama Keadaan tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia. Surat Keputusan sebagaimana dimaksud dapat mulai digunakan

sebagai pembiayaan sejak 1 April 2020 dan ditagihkan pada masing-masing unit kerja. Hal lain yang menjadi perhatian adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian Transport Lokal dan Uang makan selama WFO sifatnya Lumpsum dengan didasarkan pada Surat Tugas Pejabat Pembuat Komitmen (Eselon III kebawah) atau Kuasa Pengguna Anggaran (Eselon II keatas) dan tidak boleh memperoleh ganda dalam sehari dengan uang komunikasi internet;
- b. Teknis Pertanggungjawaban Honor Narasumber tidak ada perubahan dan sesuai dengan mekanisme yang telah dilaksanakan selama ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan;
- c. Untuk pembelian vitamin atau penambah daya tahan tubuh dibeli oleh PPK dan sifatnya sekali pembelian langsung habis (tidak menghasilkan barang persediaan) dengan lampiran bukti pertanggungjawaban tanda terima vitamin;
- d. Untuk pejabat/pegawai yang akan melaksanakan *swab test* harus mendapat Surat Tugas dari Eselon I (untuk Eselon II) dan Kepala Biro atau Sekretaris Kedeputusan (Untuk Eselon III kebawah);
- e. Unit kerja yang tidak memiliki akun yang tepat untuk pertanggungjawaban maka dapat menggunakan akun yang sifatnya mirip untuk sementara dan nantinya setelah pandemik berakhir harus melakukan revisi anggaran dan ralat SPM agar pertanggungjawaban dapat menggunakan akun yang seharusnya;
- f. Unit Kerja harus membuat sub komponen khusus terkait penanggulangan COVID-19 agar nantinya belanja yang telah dilakukan dapat menghasilkan output yang sesuai.



### 3.3 Pengelolaan Arsip dan Persuratan

#### 1. Pengawasan Kearsipan Tahun 2020

Kegiatan pengawasan ini merujuk pada surat dari Kepala Pusat Akreditasi Arsip Nasional Indonesia Nomor B-AK.01.00/963/2020 perihal pengawasan kearsipan tahun 2020. Pelaksanaan pengawan kearsipan ini dilakukan dengan metode monitoring pasif, yaitu dilaksanakan melalui verifikasi bukti yang disampaikan. Sasaran dari pengawasan kearsipan ini yaitu pengawasan terhadap program penyelamatan arsip statis serta monitoring pengawasan sistem kearsipan. Cakupan dari sistem kearsipan yang dimaksud yaitu terdiri dari beberapa aspek, antara lain aspek kebijakan, aspek pembinaan kearsipan, aspek pengelolaan arsip dinamis, aspek sumber daya kearsipan.

Pada Tahun 2019, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memperoleh nilai indeks kearsipan 84,18 dengan kategori memuaskan. Meskipun telah memperoleh nilai dengan kategori memuaskan, namun masih terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan oleh ANRI untuk perbaikan dalam pengelolaan arsip. Dan berdasarkan rekomendasi tersebut pula, pengawasan melalui pengisian formulir

tersebut dilakukan sesuai aspek yang diminta dalam pengawasan. Batas waktu pengisian formulir tersebut yaitu pada tanggal 30 April 2020.

### **3.4 Layanan Organisasi dan Kerumahtanggaan**

#### **1. Pelaksanaan Rapid Test Covid-19 Tahap 1 di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Kegiatan ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi penularan Covid-19 dengan cara dilaksanakannya rapid test covid-19 tahap 1, yang diikuti oleh 40 orang pegawai Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

#### **2. Kegiatan Marves Peduli**

Kegiatan Marves Peduli adalah salah satu kegiatan sosial yang dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam rangka membantu kebutuhan sehari-hari ditengah pandemic Covid-19. Penyampaian 1000 paket sembako dibagi kebeberapa daerah yang terdampak Covid-19 diantaranya Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Depok. Sebelumnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi juga turut melakukan donasi berupa APD, masker, handsanitizer dan keperluan medis lainnya yang telah disebar keberbagai Rumah Sakit di Surabaya, Bekasi, Kuningan dan RS Budi Kemuliaan

### **3.5 Penyusunan Dokumen Program**

#### **1. Pembahasan Lanjutan Rencana Strategis dan IKU dan SS Deputi**

Tahun ini merupakan tahun ketiga tim Renstra menyusun Renstra Kemenko Marves namun terjadi keterlambatan dikarenakan wabah Covid-19, rekomendasi yang diberikan oleh Menpan adalah Kemenko Marves harus membentuk keselerasan dan turunan pohon kinerja mulai dari Menko hingga individu. Beberapa poin penting dari pembahasan ini antara lain:

- a. SS Customer Kemenko cascading ke SS Customer Deputi:
  - Cascading direct, IKU Kemenko = IKU Deputi
  - Cascading proxy, IKU Deputi komponen/sub IKU dari Kemenko; atau
  - Cascading indirect, IKU Kemenko dan IKU Deputi memiliki hubungan kausal.
- b. SS Proses Bisnis Internal Kemenko cascading ke SS Proses Bisnis Internal Deputi
  - Cascading proxy, IKU Deputi komponen/sub IKU dari Kemenko; atau
  - Cascading indirect, IKU Kemenko dan IKU Deputi memiliki hubungan kausal.
- c. SS L & G Kemenko direct cascading ke SS Customer Setmenko
- d. Konsep cascading sasaran strategis managerial:
  - SS Learning & Growth Kemenko direct cascading ke SS Stakeholder Setmenko; atau
  - SS Learning & Growth Kemenko direct cascading ke SS Customer Setmenko
- e. Peta strategis harus difinalkan terlebih dahulu, untuk narasi akan menyesuaikan;

- f. Kemenko Marves akan mengirimkan draft yang sudah selesai ke Bappenas, agar Bappenas mengetahui progress dari Renstra yang telah disusun.

## **2. Finalisasi Peta Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Peta Strategis Kemenko harus mencerminkan Tugas dan Fungsi Kemenko Marves sesuai amanat pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden nomor 92 tahun 2019. Setiap unit kerja bisa memastikan bahwa Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan menggambarkan 4 Perspektif baik Stakeholder Perspective, Customer Perspective, Internal Business Proses, Learning & Growth Perspective yang dapat diukur target dan pencapaiannya serta mendukung pencapaian Indikator dan target dalam RPJMN 2020-2024. Penetapan peta strategi dan indikator kinerja utama ini juga akan dijadikan sebagai dasar penilaian kinerja Kemenko Marves oleh MenPAN-RB sehingga Sasaran Strategis dan IKU ini benar-benar perlu kita ukur bagaimana Kementerian/lembaga yang kita koordinasikan mencapai target IKUnya yang ditetapkan di RPJMN 2020-2024. Hal yang di perhatikan dalam kegiatan ini adalah:

- a. Diharapkan peran dan kerjasama yang baik dari Kedepujian dalam perumusan Peta Strategis ini agar kita dapat memastikan Target-target dan indikator dalam program prioritas nasional dalam RPJMN 2020-2024 yang dikoordinasikan Kemenko dapat tercapai sesuai janji Prioritas Presiden dan Wakil Presiden;
- b. Masing-masing Eselon 1 harus mempunyai *clear bisnis* yang akan disusun, walaupun dalam renjanya akan masuk ke dalam kegiatan teknis;
- c. Namun restrukturisasi ini belum final dengan Kemenkeu, sehingga menyebabkan batas penyelesaian Renstra maksimal diundur menjadi 10 mei;
- d. Kasus Covid-19 merubah rangka ekonomi makro dan tatanan kegiatan di seluruh Kementerian dan Lembaga;
- e. Setiap *blueprint* dari Eselon 1 harus mencerminkan pendekatan perencanaan program yakni RPJMN, RKP, PN, dan Prioritas Bidang, agar holistik dan tidak keluar jalur;
- f. Setiap kementerian teknis harus menyerahkan Renstranya ke Kemenko Marves, sehingga bisa membaca *blueprint*, memantau seberapa besar, dan lokasinya dari kegiatan tersebut;
- g. Masing-masing kedepujian bisa menyusun Renstra dari level program hingga level kegiatan, Biro Perencanaan bertugas untuk mengkoordinasikan dan memastikan renstra tersebut runtut dan sesuai dengan ketentuan;

## **3. Pembahasan Penghematan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020**

Seluruh anggaran Kementerian dipotong disebabkan adanya pandemi COVID-19. Untuk Kementerian Koordinator dipotong sebesar Rp. 11.946.968.000 dari pagu awal Rp. 271.543.385.000 atau sebesar 4.4 %. Dari besaran penghematan yang diperoleh oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Sekretariat Kemenko hanya mengalami pemotongan sebesar Rp. 1.000.000.000 dikarenakan sedang dalam upaya meraih nilai Reformasi Birokrasi 75 % agar dalam



waktu dekat Tunjangan Kinerja Kemenkomarves naik menjadi 80 %. Selain itu juga dalam penyiapan sarana dan prasarana kerja unit kerja sesuai dengan SOTK baru. Adapun perhitungan penghematan tiap unit kerja di Kemenkomarves sebagai berikut:

 <b>PERHITUNGAN PENGHEMATAN DARI BELANJA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI</b>		 Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi		
Program	Pagu Perdin LN (Rp)	Sisa Perdin LN (Rp)	Penghematan (Rp)	Sisa Perdin LN (Rp)
<b>Program 01. Dukungan Manajemen</b>	<b>2.923.616.000</b>	<b>2.922.774.500</b>	<b>1.000.000.000</b>	1.922.774.500
1. Biro Umum				
2. Biro Komunikasi				
3. Biro Hukum	626.884.000	626.884.000	220.000.000	406.884.000
4. Biro Perencanaan	686.681.000	686.681.000	230.000.000	456.681.000
5. Inspektorat	916.421.000	915.579.500	310.000.000	605.579.500
6. Staf Ahli	693.630.000	693.630.000	240.000.000	453.630.000
<b>Program 06. Pengembangan Kebijakan</b>	<b>17.311.222.000</b>	<b>16.668.714.096</b>	<b>10.946.968.000</b>	5.721.746.096
1. Deputi 1	7.944.281.000	7.812.801.256	5.145.074.960	2.667.726.296
2. Deputi 2	2.728.128.000	2.696.841.861	1.751.514.880	945.326.981
3. Deputi 3	3.320.957.000	2.987.677.100	1.970.454.240	1.017.222.860
4. Deputi 4	3.317.856.000	3.171.393.879	2.079.923.920	1.091.469.959

### 3.6 Pemantauan dan Evaluasi

#### 1. Tindak Lanjut Koordinasi Area Manajemen Perubahan dan Area Akuntabilitas terkait Rencana Aksi RB dalam Mewujudkan Tukin 80%

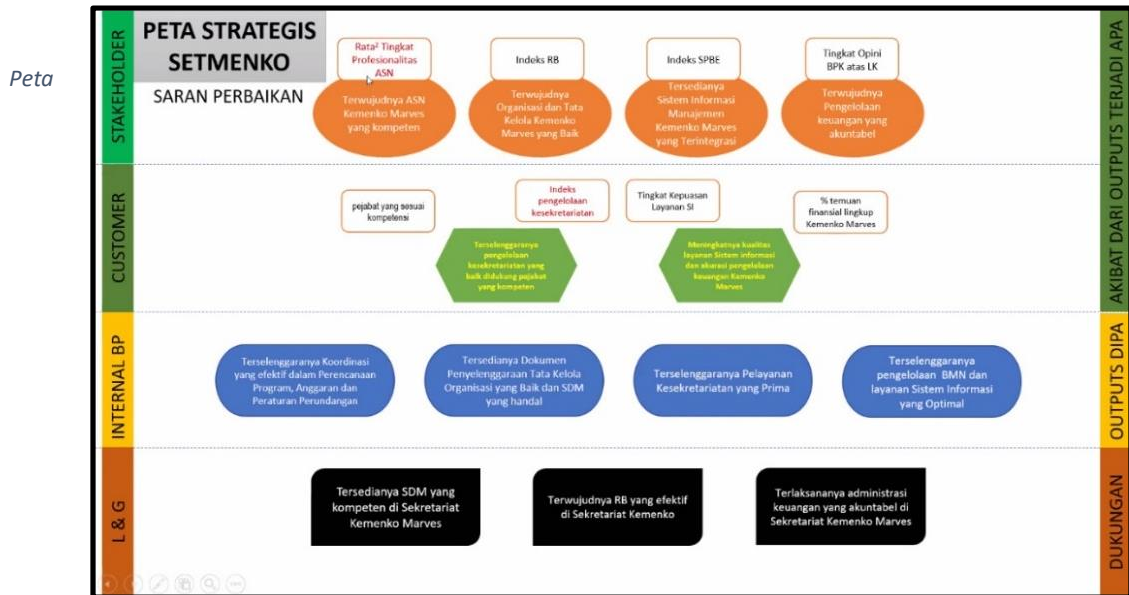
Dasar Penilaian PMPRB adalah SOTK baru, untuk penilaian kinerja diperlukan penyusunan PK sesuai dengan SOTK baru mengingat PK berdasarkan SOTK lama sudah dinilai tidak berlaku karena Permenko Nomor 2 berlaku mulai 4 Maret 2020 namun untuk menyusun PK basis dokumennya adalah renstra dan DIPA tetapi sampai saat ini dokumen tersebut belum selesai dan KemenPAN RB memahami masa transisi ini. Diharapkan Renstra dapat diselesaikan karena akan dijadikan pedoman road map Kemenko Marves yang nantinya akan dijabarkan dalam Renstra Unit Eselon I dan II.

Berdasarkan rekomendasi KemenPAN RB pada area akuntabilitas maka Kemenko Marves diharapkan fokus terhadap output yang ingin dicapai dalam rencana aksi dan dokumen diarsipkan dengan baik, tidak hanya berupa tulisan di matriks. Telah disusun juga SK Tim Nasional Kemenko Marves dengan Pejabat Eselon I sebagai Pengarah dan Eselon II sebagai penanggung jawab di 8 area perubahan.

Berkaitan dengan *quick wins*, dikarenakan masih menggunakan SOTK lama jadi tidak ada perubahan signifikan maka tidak perlu membuat yang baru. Program *quick win* dikoordinasikan oleh Bagian Dukungan Kebijakan Strategis dan sudah ada Kepmenko tahun 2019 dan sudah dilaksanakan evaluasi namun belum sampai tuntas. Program ini juga tidak perlu terlalu banyak hanya yang *iconic* saja, program ini juga sudah dilakukan pendekatan kepada para Deputi dan program *quick wins* pada unit kerja sudah bisa disusun untuk *quick wins* tahun 2020.

## 2. Finalisasi Perjanjian Kinerja Sekretaris Kementerian Koordinator, Pembaharuan PK Inspektur dan Eselon II lingkup Sekretariat Kementerian Koordinator

Perjanjian Kinerja didasarkan pada DIPA Anggaran, jika anggaran belum siap maka sebaiknya tidak memaksakan untuk menyelesaikan Perjanjian Kinerja pada waktu yang cepat, KemenPAN RB juga mengharapkan Perjanjian Kinerja harus bicara kualitas.



Gambar 2  
Strategis  
Setmenko

Sekretariat Kementerian Koordinator mempunyai empat tugas yaitu koordinasi, pembinaan, dukungan/pelayanan, dan penyelenggaraan. Draft PK saat ini masih terlalu banyak komponen sehingga perlu disederhanakan dan fokus kepada sosio kultural dan manajerial. Berikut ini adalah gambaran peta strategis Sekretariat Kementerian Koordinator:

IKU yang disarankan pada Stakeholder Perspektif yaitu rata-rata tingkat profesionalitas ASN, indeks RB, indeks SPBE, dan tingkat opini BPK atas laporan keuangan sedangkan IKU yang disarankan pada Customer Perspektif yaitu Pejabat yang sesuai kompetensi, indeks pengelolaan kesekretariatan, tingkat kepuasan layanan SI, dan persentase temuan finansial lingkup Kemenko Marves.

### 3.7 Pelaporan Kinerja

#### 1. Koordinasi Mekanisme Penyampaian Pelaporan Kegiatan dan Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi pasca perubahan SOTK

Terdapat 2 (dua) kewajiban laporan yang harus dilaksanakan oleh unit kerja yaitu laporan kegiatan dan kinerja, laporan kegiatan adalah laporan yang menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab unit kerja dalam menangani isu yang di bidangi sedangkan laporan kinerja adalah laporan yang disusun berdasarkan Permenpan 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja.

Format laporan kinerja saat ini menggunakan format baku yang telah ditetapkan melalui Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 dan laporan kinerja eselon I harus di input kedalam E-SAKIP Reviu KEMENPAN-RB (<https://esr.menpan.go.id>). E-Laporan sebagai alat bantu pelaporan di lingkungan Kemenko Marves pada saat ini sedang dalam tahap pengembangan, masih menunggu pengesahan DIPA terbaru untuk menyesuaikan isi aplikasi dengan SOTK terbaru.

Mengingat dalam Permenko Nomor 2 Tahun 2020 tertuang bahwa unit kerja tetap menjalankan tugas sesuai SOTK lama selama belum ditetapkan SOTK baru maka forum sepakat bahwa seluruh kegiatan yang telah dilakukan dari Januari tetap dilaporkan mengikuti format RKAKL lama. Unit kerja akan menyampaikan Laporan Kegiatan Januari s.d. Maret sesuai dengan SOTK lama melalui E-laporan dengan catatan bahwa unit Eselon I baru yang menggunakan anggaran pada unit Eselon I lama bertanggung jawab dalam mensupport data kegiatan yang dilaksanakan.

Biro Perencanaan akan menyusun Surat Edaran tentang Mekanisme Pelaporan selama masa Transisi Perubahan SOTK di lingkungan Kemenko Marves dan akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis segera setelah E-Laporan selesai diperbaharui.

### **3. 8 Dukungan Sistem Akuntabilitas Kinerja**

#### **1. Sosialisasi Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) DJA**

Evaluasi kinerja anggaran tentang pengukuran kinerja dan perencanaan kinerja anggaran Kemenko Marves harus mencapai nilai terbaik, pengukuran penilaian dalam analisis anggaran tahun berjalan dan tahun sebelumnya dapat memberikan rekomendasi perencanaan anggaran yang lebih efektif untuk tahun anggaran selanjutnya.

Saat ini nilai kinerja anggaran Kemenko Marves 92,57%. Artinya masih banyak yang perlu dikembangkan dengan melakukan langkah-langkah perbaikan, optimalkan kualitas informasi dan maksimalkan kinerja. Capaian kinerja anggaran Kemenko Marves 2019 jika nilai IKPA ditambah nilai SMART yaitu 93%. Kemenko Marves pada tahun 2019 memiliki 10 Sasaran Strategis, jika 10 Sasaran tercapai maka nilai kinerja anggaran akan sempurna 100%. Apabila dilihat dari aplikasi SMART, Kemenko Marves ada di Posisi 4 yaitu posisi terendah. Nilai penggabungan SMART 60% dan Menko ada diatas sedikit rata rata nasional. Khusus Aplikasi SMART nilai 92,28 yaitu 50 % dari sasaran strategis dan dapat dikatakan nilai rata-rata Eselon 1 pada tahun 2019 tidak optimal karena capaian Eselon I di level sasaran program tidak terhubung dengan sasaran strategis.

Penginputan untuk Triwulan I sementara menggunakan Kinerja Anggara sesuai SOTK lama terlebih dahulu. Untuk sekarang masih disesuaikan dengan dokumen yang ada. Nanti harus ada transisi perhitungan yang smooth dengan perubahan DIPA baru.

### 3.9 Dukungan Kebijakan Strategis

#### 1. Evaluasi Pelaksanaan Quick Wins Kemenko Maritim Tahun 2019 dan Penyusunan Quick Wins Kemenko Marves Tahun 2020

Pada tahun 2019 terdapat tiga Quick Wins dan dua di antaranya merupakan kegiatan yang dikelola oleh Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim sedangkan sisanya dikelola oleh Deputy Bidang Koordinasi SDM, IPTEK, dan Budaya Maritim. Program yang dimasukkan ke dalam quickwins tahun 2019 semuanya telah tercapai dan menghasilkan output yang sesuai.

Saat ini, Kemenko Marves perlu menyusun Quick Wins untuk tahun 2020. Oleh karena itu, seluruh unit kerja level Eselon I perlu mengusulkan program-program yang sesuai untuk menjadi program percepatan dan dirasa dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun. Biro Perencanaan telah mengidentifikasi kegiatan di lingkup deputy yang menjadi major project yaitu sebanyak 41 kegiatan yang harus di kawal oleh pihak kedeputian.

Tantangan penyusunan quick wins Kemenko Marves tahun 2020 antara lain belum selesainya dokumen Renstra dan Renja Kemenko Marves yang memuat kegiatan prioritas, rentang antara waktu penyelesaian target dengan waktu penyusunan target yang cenderung terlalu pendek, dan mekanisme koordinasi dan ruang gerak yang terbatas dalam kondisi WFH karena pandemic Covid-19 di Indonesia.

Sudah 5 (lima) unit kerja yang menyampaikan usulan Program Prioritas dan Quick Wins yang akan dibahas lebih lanjut.

##### a. Usulan Quick Wins Deputy Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi:

No	Program Prioritas	Quick Wins
1	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI) dan rencana aksi KKI	Penyusunan Rperpres Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Periode Ke-2 Tahun 2020-2024
2	Implementasi Kesepakatan Bersama 8 Kementerian/Lembaga tentang Pertukaran Data dan Informasi dalam Rangka Penegakan Hukum di Laut	1. Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) yang disepakati oleh para pihak 2. Penunjukan personil (Liaison Officer) yang bertugas dalam pelaksanaan pertukaran data dan informasi sebagai perwakilan di masing-masing instansi
3	Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera kepada United	Submisi Landas Kontinen Indonesia di luar 200 mil laut untuk segmen barat Sumatera kepada United

	Nations Commision on the Limits of the Continental Shelf (UNCLCS)	Nations Commision on the Limits of the Continental Shelf (UNCLCS)
--	---	---

Tabel 1 Usulan Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi

b. Usulan Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim:

No	Program Prioritas	Quick Wins
1	Percepatan Penyelesaian Penataan Ruang Laut Nasional, Zonasi Daerah dan Kawasan Laut	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Percepatan Penyelesaian RZ-WP3K dan RZ Kawasan Laut
2	Pencapaian peningkatan produksi udang melalui Pengembangan Kawasan Tambak	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Tambak di Lokasi Prioritas
3	Tata Kelola Garam	Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Pencapaian Target Produksi Garam

Tabel 2 Usulan Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

c. Usulan Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan:

No	Program Prioritas	Quick Wins
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup (PP1))	Pengelolaan dan Penyelamatan Danau Prioritas
2	Pembangunan Rendah Karbon (PP3)	Implementasi <i>Carbon Pricing</i> (Nilai Keekonomian Karbon)

Tabel 3 Usulan Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

d. Usulan Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

No	Program Prioritas	Quick Wins
1	Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara	Hilirisasi bijih nikel (ore) kadar rendah (limonit) dengan metode high pressure acid leaching (HPAL) untuk mendukung pembangunan industri baterai lithium bagi kendaraan listrik

Tabel 4 Usulan Quick Wins Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

- e. Usulan Program Prioritas dan Quick Wins Biro Hukum adalah Penataan Kelembagaan. Kemenpan RB meminta kepada setiap K/L untuk memasukan penataan organisasi dalam Quick Wins.

### 3. 10 Penyiapan Bahan Persidangan

NO	TANGGAL	URAIAN
1	01/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Dirut BPJS Kesehatan, Direktur Perluasan dan Pelayanan Kerja, dan Direktur IT membahas data peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (disiapkan data per provinsi di Jawa dan jabodetabek serta dibedakan perkelas).
2	01/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> progress pekerjaan Deputi 1 mengenai RUU Landas Kontinen, FIR, AIS, dan Submisi Malaysia terkait Laut Cina Selatan.
3	02/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Kepala BMKG di Kediaman.
4	02/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik.
5	02/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Persiapan Menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1441 H.
6	02/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Koordinasi Rakor <i>Realignment Flight Information Region</i> .
7	02/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> progress pekerjaan Deputi 4 mengenai Citarum, Produk Kehutanan, Penanganan Sampah, dan <i>Carbon Pricing</i> .
8	02/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan CEO Huawei membahas Deteksi Corona menggunakan <i>Artificial Intellegence</i> .
9	03/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Peningkatan Rasio Elektrifikasi Pedesaan.
10	03/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Strategi Peningkatan Peringkat Indonesia <i>dalam Programme for International Student Assessment (PISA)</i>
11	03/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> progress pekerjaan Deputi 4 mengenai Citarum, Produk Kehutanan, Penanganan Sampah, dan <i>Carbon Pricing</i> .
12	03/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> progress pekerjaan Deputi 6 mengenai KCIC dan LRT.
13	03/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor mengenai Arus Mudik 2020.

14	05/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Koordinasi Tim Penyusun Buku Panduan Mudik 2020.
15	06/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19.
16	06/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Penyampaian Hasil Ratas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19.
17	06/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Lanjutan <i>Realignment Flight Information Region</i> .
18	07/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Efektivitas Penyaluran Program Jaring Pengaman Sosial.
19	07/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Percepatan Program Padat Karya Tunai.
20	07/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Dirjen Hubla, Dirjen Hubdar, Dirjen Hubud, Staf Ahli Hukum Kemenhub, Staf Khusus Media Kemenhub, dan Dirjen Aspasaf Kemlu membahas Transportasi Selama Masa Covid-19.
21	07/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Percepatan Peningkatan Budidaya Udang Vaname.
22	07/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Konsultasi Publik Pedoman dan Petunjuk Teknis Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Covid-19.
23	07/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Covid-19.
24	08/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Pengarahan Presiden Kepada Para Kepala Daerah se-Jabodetabek Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19.
25	08/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Lanjutan <i>Realignment Flight Information Region</i> .
26	08/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Kepala BMKG.
27	08/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor LRT.
28	09/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapin Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik.
29	09/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Dirjen Perhubungan Darat.
30	10/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Bapak Purbaya, Direktur Utama Bank Mandiri, dan Menteri BUMN.
31	11/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Irjen Kemenhub, Staf Ahli Hukum Kemenhub, Kabiro Hukum Kemenhub, Kepala BPTJ, dan Staf Khusus Kemenhub.

32	11/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Menteri dan Wakil Menteri BUMN.
33	12/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Menteri dan Wakil Menteri BUMN.
34	12/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Menteri dan Wakil Menteri BUMN serta Gubernur Bank Indonesia.
35	12/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> KEM PPKF 2021, Resource Envelope, Refocusing APBN 2020, dan Aspek Hukum Perppu Pimpinan Menko Polhukam.
36	13/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Penyampaian Hasil Ratas Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19.
37	13/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Bandara Kediri.
38	13/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Koordinasi Tingkat Menteri membahas pelaksanaan PSBB dalam Skala Bertingkat, Draft Kerangka Ekonomi Makro Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021, dan Realokasi dan Refocusing Belanja KL Tahun 2020.
39	14/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Sidang Kabinet Paripurna membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, Resources Envelope Pagu Indikatif K/L Tahun 2021, dan Refocusing dan Realokasi Anggaran K/L dan Transfer Daerah dalam APBN Tahun 2020.
40	14/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Finalisasi Daftar Usulan Proyek Strategis Nasional.
41	15/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Program Mitigasi Dampak Covid-19 Terhadap UMKM.
42	15/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Ratas Optimalisasi Industri Dalam Negeri Untuk Penanganan Covid-19.
43	15/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Pencanaan Pembangunan Bandar Udara Baru Kediri.
44	15/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor <i>Realignment Flight Information Region</i> (FIR) dan <i>Defence Cooperation Agreement</i> (DCA).
45	15/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Pengembangan Desa Wisata di Destinasi Super Prioritas Danau Toba.



46	15/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Pengembangan Desa Wisata di Destinasi Super Prioritas Danau Toba.
47	15/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Finalisasi Daftar Usulan Proyek Strategis Nasional.
48	16/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Koordinasi Lanjutan Pembahasan tentang Program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional).
49	18/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Intern Program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Outlook APBN 2020.
50	18/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19.
51	18/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Lanjutan Pengelolaan Produk Hutan Berkelanjutan.
52	18/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Terkait strategi komunikasi TKA.
53	18/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference Motivational Speech Grab All Hands Town Hall</i> .
54	18/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan ADIA dan Investor Asing.
55	19/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Penyederhanaan Prosedur Bansos Tunai dan BLT Dana Desa.
56	19/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Persiapan Idul Fitri 1441 H/ 2020 M.
57	19/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> menerima Audiensi Pak Janoe Arijanto ( <i>Chairman of</i> Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia).
58	19/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan <i>President</i> Microsoft Asia membahas <i>update</i> bisnis Microsoft di Indonesia.
59	19/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor <i>Realignment Flight Information Region (FIR)</i> dan <i>Defence Cooperation Agreement (DCA)</i> RI-Singapura.
60	19/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Pengembangan Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) Pollung.
61	20/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Rektor UIN Banten, Rektor UIN Lampung, Rektor UIN Palembang, Rektor UIN Bandung, Rektor IAIN Papua, dan Rektor UIN Alauddin Makassar membahas TKA dan Hilirisasi.

62	20/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Verdhana Virtual Blusukan: <i>Grassroots - Tour to 20 Locations Across Indonesia Archipelago</i> .
63	20/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Peluncuran Produk Kontribusi Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19.
64	20/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Intern tentang Rencana Pengurangan Pengetatan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
65	20/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Intern tentang Cuti Bersama.
66	20/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor terkait Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).
67	21/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Lanjutan Pembahasan Antisipasi Mudik.
68	21/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok.
69	21/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Raker Komisi V DPR RI.
70	22/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> <i>Keynote Speech Digital Launch of Indonesia's Multistakeholder Action Plan</i> .
71	22/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Lanjutan Program Mitigasi Dampak Covid-19 Pada Sektor Riil.
72	23/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Intern Lanjutan Pembahasan Penyelenggaraan PON dan Peparnas XX di Papua Tahun 2020.
73	23/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat terkait tidak mudik.
74	23/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Boston Consultant Group membahas <i>energy security</i> dan IKN.
75	23/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor <i>Realignment Flight Information Region (FIR)</i> dan <i>Defence Cooperation Agreement (DCA)</i> .
76	23/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Eselon I lingkup Kemenhub.
77	24/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Presiden Direktur Ferron Dexa Pharmac membahas TKDN Farmasi untuk Industri Farmasi Nasional.
78	24/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan para Kapolsek Medan.
79	25/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rakor Evaluasi Larangan Mudik.

80	27/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Ambassador UAE membahas mengenai bantuan COVID-19 dari UAE
81	27/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Laporan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
82	27/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Evaluasi Pelaksanaan Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar.
83	27/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Presiden Direktur Ferron Dexa Pharmac membahas TKDN Farmasi untuk Industri Farmasi Nasional.
84	27/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Menko Polhukam, Menko Perekonomian, dan Menko PMK membahas Mitigasi Kemiskinan Perkotaan karena Imbas Covid-19.
85	27/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Professor Wiku.
86	27/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> dengan Menteri Pariwisata membahas promosi kampanye protokol kesehatan menghadapi Covid-19.
87	28/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi bertemu dengan Presiden RI di Istana Bogor.
88	28/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Ratas Lanjutan Pembahasan Antisipasi Kebutuhan Bahan Pokok.
89	28/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Rapat Intern membahas Kebijakan Harga BBM dalam Situasi Pandemi Covid-19.
90	28/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Diskusi Membantu Sektor UMKM Melalui Ecommerce Platform Dalam Periode Covid-19.
91	28/04/2020	Fasilitasi Menko Maritim dan Investasi <i>Video Conference</i> Diskusi Gofood/Grabfood untuk Membantu Mengembangkan UMKM Makanan Bisa Berkembang Selama Periode Covid-19.

Tabel 5 Agenda Kegiatan Subbagian Penyiapan Bahan Persidangan

### 3. 11 Perumusan Hasil Persidangan

1. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat *Flight Information Region* (FIR) dengan beberapa arahan Menko bidang Politik Hukum dan Keamanan beberapa diantaranya adalah pihak Singapura tetap melakukan latihan meskipun selama ini pihak Indonesia tidak menginginkannya atau ingin mengubah area latihan. Selain itu pihak Indonesia juga tidak mendapatkan perjanjian ekstradisi yang merupakan hal penting bagi Indonesia agar pelaku tindak pidana tidak bisa lari lagi ke Singapura. Oleh karena itu, harus dipertimbangkan dengan baik untuk menyelesaikan perjanjian ini.

2. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Udang Vaname dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
  - a. Diusulkan agar Aceh Singkil menjadi salah satu lokasi dari budidaya udang dikarenakan infrastruktur dan kualitas air bersih yang baik. Air bersih merupakan salah satu faktor penting dalam budidaya udang.
  - b. Menteri Kelautan dan Perikanan agar menentukan 5 (lima) daerah prioritas untuk lokasi budidaya udang dan harus segera dibuat.
  - c. Sumber daya manusia (SDM) harap diberikan pelatihan karena salah satu kunci dari keberhasilan adalah profesionalisme dan manajemen dari SDM itu sendiri.
3. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Peraturan Menteri Perhubungan Terkait Tata Cara Pengendalian Transportasi Dalam Menghadapi Covid-19 dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
  - a. Permintaan dari Gubernur Jawa Timur yang ingin ojek online (ojol) tidak dihentikan agar diatur pada daerah-daerah tertentu sesuai kearifan lokal yang ada dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - b. Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan Kakorlantas Polri agar tidak terlalu keras melakukan penindakan terhadap pelanggar pelaksanaan pengendalian transportasi.
  - c. Keputusan rapat terbatas bersama Presiden pada hari ini terkait antisipasi mudik telah resmi melarang ASN, pegawai BUMN dengan segala anak perusahaannya, dan anggota TNI/Polri untuk mudik.
4. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Monitoring arahan Presiden terkait covid 19 dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
  - a. Menteri Kelautan dan Perikanan agar tetap mendorong pengembangan Peraturan Menteri (Permen) terkait dengan rajungan dan lobster sehingga bisa menciptakan lapangan kerja agar ekonomi tetap jalan.
  - b. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) agar apa yang menjadi arahan Presiden dibidang Kementerian LHK bisa dijalankan dengan baik.
  - c. Status Indonesia dengan adanya Covid-19 darurat sehingga tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh para Menteri menyesuaikan dengan kondisi darurat saat ini.
5. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Manajemen Arus Mudik 2020 dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
  - a. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menghimbau agar jajaran pemerintahan untuk mengajak masyarakat agar tidak mudik dan tidak piknik, serta social distancing dalam menghadapi wabah corona, dengan penjelasan yang rasional.
  - b. Kementerian Agama untuk mengkaji tindakan-tindakan yang diperlukan untuk mencegah penyebaran wabah corona di tengah kumpulan kegiatan-kegiatan keagamaan pada hari raya yang akan banyak terjadi dalam waktu dekat.
  - c. Menghimbau kepada peserta rapat bahwa harus ada sosialisasi secara maksimal kepada masyarakat dalam menghadapi wabah corona.
  - d. PT. KAI agar menghentikan penjualan tiket mudik.

6. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Tidak Mudik 2020 dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
  - a. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi akan mengajukan rapat terbatas dengan Presiden untuk memutuskan kebijakan peniadaan mudik dan piknik lebaran 2020.
  - b. Terkait antisipasi kedatangan TKI pada saat lebaran 2020 dapat digunakan kebijakan karantina selama 2 (dua) minggu pada saat kedatangan dari luar negeri.
  - c. Kementerian Kominfo agar menyiapkan materi kampanye yang dapat dipahami oleh masyarakat dan segera lakukan sosialisasi setelah ada putusan dari Presiden.
  - d. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengarahkan Plt. Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi agar menghitung skenario mengenai pertimbangan pengumuman tidak mudik agar tidak ada masyarakat yang mudik di kondisi work from home (WFH) seperti saat ini.
7. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Kewajiban Karantina Arus Balik Pekerja Migran Indonesia dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
  - a. Menteri dalam Negeri untuk lebih tegas dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat bahwa Pemerintah mewajibkan karantina untuk orang-orang yang masuk ke Indonesia dari luar negeri.
  - b. Logistik harus benar-benar diperkuat, sehingga tidak terjadi chaos dalam menghadapi wabah corona yang sedang terjadi.
  - c. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyarankan agar Gubernur daerah yang menerima kedatangan awal (entry point) tenaga kerja Indonesia (TKI) dari Malaysia, untuk mengkarantina para pekerja tersebut sebelum mereka mobilisasi ke daerah lain di Indonesia.
  - d. Gubernur Kepulauan Riau agar menyiapkan fasilitas karantina tenaga kerja migran Indonesia dari Malaysia selama 14 hari.
  - e. Menteri Kesehatan untuk membantu pengecekan rapid test di setiap pintu masuk daerah-daerah di Indonesia.
8. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Arus Mudik lanjutan 2020 dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
  - a. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengusulkan agar rumah tangga dengan daya 900 watt dapat juga diberikan dispensasi pembayaran seperti untuk rumah tangga dengan daya 450 watt.
  - b. Untuk sementara ini, namun belum diputuskan dalam rapat terbatas, akan diberlakukan karantina wilayah parsial, sehingga perlu dipastikan bahwa kebutuhan logistik dan keuangan untuk masyarakat banyak (khususnya yang kurang mampu) sudah dapat disiapkan dengan baik.
  - c. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menekankan pentingnya arahan Presiden RI supaya masyarakat yang kurang mampu sudah dapat dijamin oleh negara.
  - d. Secara spesifik, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengarahkan supaya tidak ada narasi dari media yang bersifat mengadu domba antara pemerintah pusat

- dengan pemerintah daerah. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi meminta agar penjelasan dari Kementerian Perhubungan lebih cermat supaya tidak dapat menjadi isu untuk memecah belah.
9. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Rapat Internal Menko Marves dan Eselon 1 dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
    - a. Menko Maritim dan Investasi memberi arahan agar masing-masing Deputi fokus pada 2 program kerja prioritas yang belum diselesaikan, sehingga program kerja tersebut tetap dapat dilaksanakan di tengah wabah Corona. Kemudian Agar Staf Khusus Pak Jodi dapat membuat agenda rapat setiap minggunya terkait hal ini.
    - b. Terdapat informasi yang perlu diketahui oleh para eselon 1, yaitu terdapat prediksi program simulasi dari Peter Ma Ceo Ping An, bahwa berdasarkan data yang ada bahwa secara global untuk wabah Corona akan menurun pada bulan Mei 2020. Namun untuk Indonesia prediksi wabah Corona masih bisa belum dapat diperkirakan dengan baik, karena mereka masih kekurangan data yang dibutuhkan dan saat ini masih sedang mengumpulkan data tersebut, namun terdapat perkiraan kasar untuk Indonesia wabah Corona bisa turun pada bulan Mei, Juni, atau Juli. Maka dari itu diharapkan Proyek-proyek Kementerian Kemaritiman dan Investasi yang masih terhambat dapat dipersiapkan sejak sekarang untuk kembali dijalankan secara maksimal berdasarkan prediksi tersebut.
    - c. Masalah Pulau Janda berhias agar segera diselesaikan Oleh Deputi bidang kedaulatan dan energi beserta Staf khusus bidang hukum dan perundang-undangan, kedepannya untuk menyelesaikan hal ini agar ada rapat lanjutan yang dipimpin Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menggunakan Fasilitasi Video Conference.
  10. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kerja Sama Digitalisasi Produk UMKM dalam Menghadapi Covid-19 dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
    - a. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menekankan bahwa akan dilakukan kampanye produk dalam negeri termasuk melibatkan warung-warung dengan menggunakan teknologi sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Koperasi dan UKM pada rapat sebelumnya.
    - b. Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi menyarankan kemungkinan untuk memasukkan subsidi Paket Data yang disebutkan oleh Bapak Rudiantara ke dalam KUR, dengan tenor dan grace period khusus.
    - c. Menanggapi informasi terkait sertifikasi dari Menko Bidang Perekonomian, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi mengarahkan agar para penyedia platform bersabar menunggu Undang-Undang Cipta Kerja karena di dalamnya sudah terkait dengan berbagai perizinan.
  11. Penyusunan dan Distribusi Risalah Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Penentuan Otoritas Pengelola (Management Authority) CITES untuk Jenis Ikan dengan beberapa arahan Menko bidang kemaritiman dan Investasi beberapa diantaranya sebagai berikut:
    - a. MA CITES jenis ikan diserahkan kepada KKP agar tidak terpisahkan dan satu pengelolaan.

- b. Pada tahap awal yang diserahkan pengelolaannya adalah Spesies Pisces (termasuk Arwana Merah yang masuk dalam Apendiks 1 CITES), sedangkan spesies selain pisces segera diputuskan pada tahun 2020, dengan timeline pembahasan yang disepakati antara KLHK, KKP, dan LIPI.
- c. KLHK agar melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Menteri LHK Nomor 106 Tahun 2018 agar regulasi dapat dieksekusi di lapangan

### 3. 12 Pengelolaan Sistem Informasi

#### 1. Pembahasan Penggunaan Aplikasi SEMARVES Sebagai Nota Dinas Elektronik

Perlu identifikasi yang lebih detil lagi untuk aplikasi semarves agar bagian Data dan Sistem Informasi bisa menentukan pengembangan aplikasi. Untuk sementara pengguna semarves hanya bagian persuratan dan digunakan hanya pada surat masuk.

Kedepannya diperlukan pihak ketiga yang handal dengan bahasa pemrograman java, dikarenakan banyaknya bug dikarenakan SSO pada aplikasi yang berjalan pada DJBC tidak sesuai dengan proses di Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

#### 2. Pembahasan Draft PK Sekretaris Kementerian Koordinator terkait dengan Layanan Data dan Sistem Informasi

*Stakeholder perspective* Sistem Informasi Manajemen Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang terintegrasi dengan IKU nilai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik memiliki target indeks 3.

*Customer perspective* meningkatnya kepuasan layanan sistem informasi dan pengelolaan keuangan dengan IKU tingkat kepuasan layanan sistem informasi dengan target persentase sebesar 68% dari survey di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi terhadap layanan sistem informasi, target IKU pada triwulan II & IV.

*Customer perspective* terkait terselenggaranya pengelolaan BMN dan layanan sistem informasi yang optimal dengan IKU pemenuhan kebutuhan minimal aplikasi umum yang terintegrasi lingkup Kemenko Marves. Adapun IKU tersebut memiliki target 4 unit jumlah aplikasi umum yang diintegrasikan, antara lain meliputi persuratan, kepegawaian, keuangan, serta pemantauan dan evaluasi tindak lanjut rapat koordinasi dengan tingkat integrasi layer pertama (yaitu data dan informasi) berupa Single Sign On. IKU ini memiliki target keluaran pada triwulan IV.

Perlu pembahasan lebih lanjut dan teknis terkait detil Perjanjian Kinerja Biro Komunikasi serta perlu dipastikan 4 aplikasi umum yang akan disediakan.

### 3. 13 Pengelolaan Opini Publik

#### 1. Laporan Media Monitoring

Pada bulan April telah terhimpun sebanyak 427 data opini publik positif, dari total 534 opini, sedangkan 13 berupa opini negatif dan selebihnya 94 bersifat netral serta penurunan angka pemberitaan seputar Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berhubungan erat dengan kurangnya jadwal dan atau

kegiatan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi serta para kedeputian yang dilaksanakan.

NO	TANGGAL PEMBERITAAN	OPINI			TOTAL
		POSITIF	NEGATIF	NETRAL	
1	1 – 7 April 2020	164	8	42	214
2	8 – 15 April 2020	84	4	17	105
3	16 – 24 April 2020	103	1	29	133
4	25 – 29 April 2020	76	0	6	82
<b>TOTAL</b>		<b>427</b>	<b>13</b>	<b>94</b>	<b>534</b>

Tabel 6 Laporan Media Monitoring

Berdasarkan data pada matriks yang tertuang dalam tabel, diketahui bahwa jumlah opini terhadap pemberitaan terkait Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mayoritas merupakan opini positif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa opini publik terhadap Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman adalah opini positif. Data pada matriks tersebut dihimpun dari 59 media massa online yang terverifikasi oleh Dewan Pers Indonesia. Sejumlah media massa online tersebut adalah sebagai berikut ini:

NO	MEDIA	JUMLAH	NO	MEDIA	JUMLAH
1	Antarnews.com	73	27	Republika.co.id	15
2	Tribunnews.com	36	28	Kompasiana.com	6
3	Kompas.com	39	29	Vivanews.com	8
4	Sindonews.com	20	30	Beritasatu.com	11
5	Juaranews.com	3	31	Viva.co.id	6
6	Detik.com	21	32	Wartaekonomi.co.id	5
7	Bisnis.com	19	33	Konfrontasi.com	3
8	Akurat.co	12	34	Sloops.com	3
9	Tempo.co	25	35	Kontan.co.id	10
10	Medcom.id	14	36	Harianhaluan.com	3
11	Borneonews.co.id	7	37	Suara.com	5
12	Cnnindonesia.com	10	38	Kabarbisnis.com	4
13	Jitunews.com	3	39	Sukabumiupdate.com	2
14	Inews.id	8	40	Katadata.co.id	10
15	Cnbcindonesia.com	12	41	Jawapos.com	9
16	Kumparan.com	20	42	Okezone.com	6
17	Hetanews.com	3	43	Tirto.id	4
18	Detakpalembang.com	2	44	Radarbogor.id	1
19	Pikiran-rakyat.com	3	45	Juaranews.com	2
20	Harianaceh.co.id	5	46	Idntimes.com	6
21	Terasmaluku.com	2	47	Posmetropadang.co.id	1
22	mimbarsumbar.id	2	48	Harianterbit.com	1
23	Cyberthreat.id	1	49	Balinews.id	1
24	Klikpositif.com	3	50	Gatra.com	3
25	Merdeka.com	24	51	Minangkabaunews.com	1
26	Liputan6.com	23	52	Jpnn.com	6



NO	MEDIA	JUMLAH	NO	MEDIA	JUMLAH
53	politiktoday.com	1	57	Inikata.com	1
54	Riaubarometer.com	2	58	Alinea.id	5
55	Galamedia.com	1	59	Suaramerdeka.com	1
56	Fokusjabar.co	1			

Tabel 7 Media Massa Online

## 2. Pembangunan Konten

Salah satu strategi membangun opini publik diantaranya dengan membuat konten-konten yang berisi informasi positif tentang ajakan pada masyarakat maupun informasi kinerja kementerian. Selama periode April 2020 terdapat 52 materi konten yang dibangun, beberapa konten tersebut adalah sebagai berikut:





### 3. Penayangan Pada Media

Pembangunan konten yang telah dilakukan selama rentang waktu bulan April 2020, telah tayang pada 3 kanal social media yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, yaitu:

- a. Twitter : @kemaritiman
- b. Instagram : @kemenkomaritim
- c. Facebook : Kemenko Bidang Kemaritiman

### 3. 14 Publikasi dan Dokumentasi

Selama bulan April 2020, telah dipublikasikan 22 siaran pers dan 6 dokumentasi kegiatan untuk Menteri Koordinator, Deputy, dan pimpinan lainnya di lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Dukungan dokumentasi dan siaran pers tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

NO	PENDOKUMENTASIAN DAN PUBLIKASI SIARAN PERS HASIL REPORTASE	KETERANGAN
1	Kemenko Marves Terus Mempercepat Pelaksanaan Rencana Aksi Implementasi Reformasi Birokrasi (RB)	3 April 2020
2	Mudik Saat Pandemi Corona, Pemerintah Batasi Kapasitas Penumpang	5 April 2020
3	Government urges people not to do the annual hometown exodus. Measures are in place to keep the number low	5 April 2020
4	Ditanya Soal IKN, Menko Luhut Tegaskan Instruksi Presiden untuk Prioritaskan Anggaran untuk Penanganan Covid-19	6 April 2020
5	Menko Luhut Minta Program Peningkatan Ekspor Udang Vaname Dikebut	7 April 2020
6	Cari Solusi Bersama, Kemenko Marves Adakan Konsultasi Publik	7 April 2020
7	Menko Luhut : Pengembangan Desa Wisata di Destinasi Super Prioritas Danau Toba Harus Segera Dikerjakan	15 April 2020
8	Pencanangan Pembangunan Bandara Kediri Secara Virtual Menko Luhut: Tetap Bersinergi Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia	15 April 2020
9	Kemenko Marves Berikan Bantuan Kepada Satgas DAS Citarum untuk Korban Banjir, Sekaligus Penanganan Pandemi Covid-19 di Bandung	15 April 2020
10	Hercules TNI AU Jemput Bantuan Yayasan Taiwan dari Kamboja	15 April 2020
11	Bantuan Lab Test Covid-19 Yang Dikoordinasikan Kemenko Marves Mulai Beroperasi Minggu Ini	16 April 2020
12	Evaluasi Rencana Pembangunan, 10 Proyek Keluar Dari Daftar PSN	16 April 2020
13	Menko Luhut Dorong Kebijakan Untuk Membantu Pelaku Usaha Perikanan Nasional Tetap Kuat Menghadapi Pandemi Covid-19	18 April 2020
14	Indonesia Menerima Bantuan Alat Medis dari Yayasan Amal Taiwan	20 April 2020
15	Pemerintah Putuskan Larang Mudik	21 April 2020
16	Menko Luhut: Limbah Plastik Salah Satu Agenda Prioritas Nasional Kami	22 April 2020
17	Kemenko Marves Bagikan 1000 Paket Sembako Untuk Warga Sekitar	22 April 2020
18	Menko Luhut : Bersama Kita Buat Indonesia Lebih Aman	24 April 2020

19	Hercules TNI AU Jemput Bantuan Yayasan Taiwan dari Kamboja	25 April 2020
20	Distribusi Bantuan dari Yayasan Taiwan Mulai Dilakukan	27 April 2020
21	Kemenko Marves, KLHK dan PRAISE Kolaborasi Dukung Pencegahan Penyebaran Covid-19	29 April 2020
22	Wujudkan Transparansi Data, Pemerintah Luncurkan Aplikasi Bersatu Lawan Covid-19	30 april 2020

PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN REPORTASE DAN PENDAMPINGAN KUNJUNGAN KERJA PIMPINAN		
NO		KETERANGAN
1	Pencanangan Pembangunan Bandara Kediri Secara Virtual Menko Luhut: Tetap Bersinergi Dukung Pembangunan Infrastruktur Indonesia	15 April 2020
2	Kemenko Marves Berikan Bantuan Kepada Satgas DAS Citarum untuk Korban Banjir, Sekaligus Penanganan Pandemi Covid-19 di Bandung	15 April 2020
3	Menko Marves Sidak Kantor Otoritas Bandara, Tol Jakarta-Cikampek, dan Stasiun Pasar Senen	24 April 2020
4	Hercules TNI AU Jemput Bantuan Yayasan Taiwan dari Kamboja	24 April 2020
5	Distribusi Bantuan dari Yayasan Taiwan Mulai Dilakukan	27 April 2020
6	Kemenko Marves, KLHK dan PRAISE Kolaborasi Dukung Pencegahan Penyebaran Covid-19	29 April 2020

Tabel 8 Dukungan Dokumentasi dan Siaran Pers

### 3. 15 Perancangan Peraturan Perundang-undangan

#### 1. Pembahasan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2020

Kegiatan ini membahas mengenai substansi dari rancangan Surat Edaran tentang Pemberian Penggantian Biaya Pemakaian Kuota Internet Bagi Para Pegawai Sebagai Pengganti Uang Konsumsi Rapat Selama Masa Bekerja Dari Rumah Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi.

Tindak lanjut :

Rancangan SE tersebut akan disempurnakan oleh bagian Perancangan Peraturan Perundang-undangan untuk kemudian disahkan melalui tanda tangan Sekretaris Kementerian Koordinator sebagai dasar penggantian biaya paket kuota untuk koordinasi melalui video conference bagi para pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### 2. Progress Report Perancangan Peraturan Perundang-undangan

Evaluasi dan pembahasan P3MK difokuskan pada peraturan internal dari Kemenko Marves, dimana tiap tahunnya telah ditentukan target capaiannya. Sedangkan untuk peraturan yang menjadi wewenang Kementerian / Lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenko Marves tetap perlu dilakukannya

yang disesuaikan dengan Program Legislasi Nasional dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, untuk peraturan K/L ini perlu juga menyesuaikan prioritas-prioritas yang ada pada RPJMN 2020-2045.

Untuk regulasi internal Kemenko Marves seperti JRA & SKKAD, JDIH, Whistleblowing system, LHKP, perlu terus didorong pembahasannya sehingga dapat segera disahkan regulasi tersebut sehingga dapat dijadikan capaian target kinerja untuk mendukung Reformasi Birokrasi di Kemenko Marves. Selain itu tiap kasubbag perlu melakukan koordinasi ke PIC di masing-masing deputi untuk inventaris rancangan peraturan yang akan disusun, untuk menjadi prioritas P3MK.

### **3. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum di Lingkungan Kemenko Marves**

Perlunya penyesuaian draft Peraturan Menteri Koordinator tentang JDIH di Lingkungan Kemenko Marves terhadap Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berkaitan dengan nomenklatur instansi. Diperlukan juga penyederhanaan/simplifikasi terhadap konsideran Menimbang dengan cukup mencantumkan derivasi Pasal 5 ayat (1) Peraturan presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.

Menyimpangi standar JDIH, selanjutnya akan meminta saran/masukan kepada BPHN terhadap pencantuman norma baru dalam hal tracking progress report regulasi untuk dijadikan pedoman dalam penyempurnaan draft Rancangan Permenko dimaksud.

Menindaklanjuti kegiatan ini, akan berkoordinasi dengan Bagian Advokasi dan Informasi Hukum dalam penyempurnaan draft Rancangan Peraturan Menteri Koordinator tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan menyiapkan surat permohonan saran dan masukan terhadap Draft Permenko tentang JDIH di Lingkungan Kemenko Marves kepada Kepala BPHN Kemenkum HAM dengan tembusan kepada Kepala Pusat JDIH.

### **4. Koordinasi Finalisasi Kepmenko tentang Komite Nasional Geopark Indonesia (KNGI)**

Sebelumnya telah disepakati untuk tidak mencantumkan Mekanisme dan Tata Kerja, sehingga yang dituangkan dalam Kepmenko Marves ini adalah Struktur Organisasi, Susunan Keanggotaan dan Tugas dari KNGI.

Dewan Pakar disepakati untuk tidak dibuat dalam struktur organisasi dengan diketuai oleh salah seorang, hal ini untuk menunjang kesetaraan dan objektivitas keilmuan yang akan menjadi sumbangsih dalam pemajuan geopark Indonesia.

Mengubah tugas Komisi Penetapan Warisan Geologi dan Geopark Nasional dengan menjadi “membantu ketua Tim pelaksana dan Wakil Ketua I Tim pelaksana di Bidang Kegeologian terutama dalam penetapan warisan geologi (Geoheritage) dan penetapan Geopark nasional dalam pengembangan Geopark.

Selanjutnya diharapkan untuk dapat menyempurnakan draft Kepemko sebelum dilakukan penyampaian kepada Menko Bidang kemaritiman dan Investasi.

## 5. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Nama Rupabumi

PBB hanya mengenal 1 institusi yg mengajukan nama rupabumi, yaitu BIG, namun demikian saat ini di Indonesia ada 2 institusi yaitu BIG dan Kemendagri yang mengurus terkait penamaan rupabumi. Untuk itu pada pasal 22 ditambahkan klausul pada ayat (5) yang berbunyi: Gazeter Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinotifikasi oleh Badan kepada *United Nations Groups of Experts on Geographical Names*. Sedangkan untuk kasus penamaan rupabumi yang terkait dengan kelautan maka ditunjuk lembaga khusus yaitu Pusat Hidrografi AL untuk mewakili di *International Hydrography Organization*.

Kemenko Marves menyambut baik dan mendukung koordinasi lintas K/L terkait dengan RPP ini. Kebutuhan pasal pengaturan perwakilan Pemerintah RI (PEMRI) sudah ada di pasal 31, ayat 3 khusus pushidros AL namun demikian akan lebih baik dalam RPP ini, dalam penjelasan terkait dengan pemberian mandat kepada BIG di UNGEGN, tidak wajib tapi jadi sarana untuk melegitimasi. Perlu dimasukkan dalam penjelasan saja. Selain itu harus ada ketentuan secara spesifik dalam pengaturan terkait peran aktif PEMRI dalam mendepositka/ menyampaikan hasil nama bisa dimasukkan dalam bagian penjelasan.

## 3. 16 Pengelolaan Kerja Sama

### 1. Pembahasan Tindak Lanjut Kesepakatan Bersama tentang Pertukaran Data dan Informasi

Agenda pertemuan meliputi briefing tentang RPP Lembaga Coast Guard yang diprakarsai Kemenko Polhukam, inventarisasi jumlah SOP tentang penegakan hukum di laut yang perlu disusun dan penentuan lembaga yang bertanggung jawab dalam penyusunan SOP. Beberapa K/L sudah mempunyai SOP, namun lingkuonya masih sempit. SOP yang telah ada perlu direvisi untuk mencakup semua K/L terkait dan perlu melibatkan Kemenko Polhukam, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Narkotika Nasional, Badan Pengawas Obat dan Makanan.

SOP akan dipilih (*cluster*) lebih lanjut berdasarkan jenis pelanggarannya agar lebih jelas instansi *focal point* dan instansi pendukung dan mengarah kepada pengembangan *Nasional Single Window* dan SOP akan dibuat dengan mengikuti format yang terdiri dari narasi dan bagan alur (*flowchart*) yang menjelaskan instansi-instansi yang terlibat dan hubungan/proses kerja antar instansi.

Kemenko Maritim dan Investasi akan membentuk Tim yang tugasnya adalah menyusun SOP dari daftar yang telah dibuat serta dapat dikembangkan lebih lanjut dan ditambahkan dengan SOP yang belum terdaftar, diharapkan masing-masing K/L yang sudah mempunyai SOP agar dikirim ke Kemenko Maritim dan Investasi c.q Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.

## **2. Pembahasan Perjanjian Kerja Sama Luar Negeri dan Kerja Sama Dalam Negeri di Lingkup Kemenko Marves**

Agenda pertemuan ini adalah membahas mengenai Perkembangan Laporan Kinerja Bagian Kerja Sama di Lingkup Kemenko Marves, hal yang dibahas antara lain:

- a. Menindaklanjuti dari rapat dengan Universitas Sebelas Maret kita sudah mengkonsepkan surat dan draft Nota Kesepakatan Bersama yang akan dikirimkan kepada para Deputi agar dapat memberikan saran atau pendapat.
- b. Perkembangan Kerjasama Internasional yang akan habis masa berlakunya pada 2020, yakni:
  - 1) MoU between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Federal Republic of Germany on Maritime Cooperation.  
Telah mengirimkan Nota Dinas Nomor 167/SETMENKO.02/ND/2020 tanggal 20 Maret dengan perihal Pemberitahuan akan Berakhirnya MoU on Maritime Cooperation RI – Jerman yang ditandatangani oleh Sesmenko dan ditujukan kepada Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi (selaku Deputi yang menangani kerja sama dimaksud) dan masih belum ada tanggapan dari Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi.
  - 2) MoC between the Ministry of Economy, Trade and Industry of Japan and the Coordinating Ministry for Maritime Affairs of the Republic of Indonesia on the Liquefied Natural Gas (LNG) Distribution and Power Plants in Eastern Indonesia
  - 3) Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur sudah bersurat dengan pihak Jepang, saat ini sedang menunggu Zero Draft dari Jepang dan Bagian kerja sama sedang menyiapkan surat pemberitahuan awal kepada Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
- c. Perkembangan Tindak Lanjut Kerjasama dengan Korea tentang Implementing Arrangement of Official Development Assistance (ODA) Project  
Sudah mendapatkan masukan dan tanggapan dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan dan Masukan sudah diberikan ke MTCRC namun masih menunggu masukan dari Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Kementerian Luar Negeri.

## **3. Persiapan Implementasi Kerja Sama Indonesia dengan UEA**

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rencana kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UEA terkait program Pendidikan menengah pertama berbasis digital yang berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi dunia pendidikan di Indonesia. Pada kesempatan ini dibahas penyusunan dokumen implementing arrangement (IA) sebagai pengaturan pelaksanaan memuat semua detail dan teknis terkait kerja sama dimaksud.

Dalam upaya penyelesaian dokumen IA, akan dibentuk *Joint Committee* yang beranggotakan perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kedutaan Besar Indonesia untuk UAE, PT. Telkom, PT. SAAL, dan kementerian atau lembaga terkait lainnya. Pihak Indonesia akan segera mengirimkan daftar nama anggota *Joint Committee*.

*Joint Committee* akan bertugas untuk menyusun detail dari IA termasuk teknis dari pelaksanaan kerja sama, road map pelaksanaan kerja sama, serta menentukan Key Performance Indicator dan skema yang disepakati untuk memonitor dan mengevaluasi kerja sama ini.

Kerja sama disepakati dilaksanakan selama 2 tahun, dimana UEA akan memberikan dana hibah untuk pengembangan pendidikan digital ke Indonesia sekitar 23 juta USD di tahun pertama kerja sama, di tahun ke 2 menggunakan APBN untuk *maintainingnya*.

#### **4. FGD Skema Dana Hibah dari Bank Dunia**

Berdasarkan peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif, Tim Transparansi Industri ekstraktif masih diketuai oleh Kemenko Perekonomian, maka diperlukan adanya revisi terkait Perpres dimaksud sebagai payung hukum. Proses revisi direncanakan agar dapat dilakukan secara parallel dengan proses transisi. Draft revisi Perpres No. 26 Tahun 2010 telah di bahas oleh Tenaga Ahli EITI dan Tim Transparansi Industri Ekstraktif di Kemenko Perekonomian. Oleh karenanya, Kemenko Marves akan berkoordinasi dengan Kemenko Perekonomian terkait proses revisi Perpres dimaksud.

World Bank akan memberikan support dana melalui program NR4D (Natural Resource for Development) di tahun 2020, dan program Hibah EGPS (Extractives Global Programmatic Support) pada tahun 2021 – 2022. Kemenko Marves, dalam hal ini Deputi 6 telah menunjuk tim untuk mengumpulkan data dan berkoordinasi secara internal dengan deputi terkait dan Biro Hukum di Kemenko Marves untuk penyiapan dari aspek administrasi dan legalitas serta untuk dapat bekerja berdampingan dengan pihak World Bank dan EITI untuk mempersiapkan teknis transisi. Selanjutnya, Kemenko Marves, dalam hal ini Biro Hukum, akan berperan aktif dalam proses revisi Perpres No. 26 Tahun 2010 dengan berkoordinasi dan mengawal proses revisi Perpres dimaksud sejak awal hingga selesai. Selain itu juga akan mendampingi dan memfasilitasi penyelesaian administrasi terkait hibah yang akan diberikan oleh World Bank.

### **3. 17 Penataan Organisasi**

#### **1. Penyederhanaan Birokrasi Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Penyederhanaan Birokrasi atau penyetaraan jabatan eselon III dan eselon IV ke dalam jabatan fungsional merupakan arahan Presiden dan harus dilaksanakan



secara nasional serta merupakan bagian dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi menuju tunjangan kinerja 80% di tahun 2020. Penyederhanaan birokrasi ini perlu mempertimbangkan masa depan terhadap karir ASN, serta mempersiapkan mitigasi apabila usulan penyederhanaan tidak disetujui oleh Kementerian PAN dan RB.

Tim Pelaksana Penyederhanaan Birokrasi akan berkoordinasi dengan Kementerian PANRB untuk melakukan validasi pada penyetaraan jabatan administrasi ke jabatan fungsional dan penyederhanaan Birokrasi akan ditindaklanjuti dengan melaksanakan rapat pimpinan untuk membahas Jabatan Administrasi yang akan disederhanakan dan yang tidak disederhanakan.

### 3. 18 Penataan Tata Laksana

#### 1. Pemantauan Penerapan Proses Bisnis di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja di Kemenko Marves melalui penambahan urusan Investasi dan adanya kebijakan penyederhanaan birokrasi (pengalihan jabatan structural eselon III dan eselon IV ke dalam Jabatan Fungsional), maka saat ini Biro Hukum terus melakukan penyesuaian kembali terhadap Proses Bisnis di lingkungan Kemenko Marves. Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis ini akan mempedomani RPJMN Tahun 2020-2024, RKP dan Renstra Kemenko Marves Tahun 2020-2024, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan urusan Kemaritiman dan Investasi.



Biro Hukum akan berkoordinasi dengan Biro Perencanaan dan Unit Eselon I lingkup Kemenko Marves untuk terus bersama-sama menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Kemenko Marves Tahun 2020-2024. Hal ini perlu dilakukan karena Dokumen Renstra menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Peta Proses Bisnis dan juga sebagai bahan evaluasi oleh Kementerian PANRB.

#### 2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Standar Operasional Prosedur

Dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka pelaksanaan SOP perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala.

Pengisian kuisisioner Monev SOP secara online memberikan kesempatan kepada responden untuk melakukan pengisian kuisisioner secara online, karena kuisisioner monev SOP ini sebagai bukti dukung pelaksanaan penilaian RB. Tahun ini ditargetkan kenaikan tunjangan 80%, salah satu indikator unsur ketatalaksanaan terkait pelaksanaan monev SOP.

Pelaksanaan Monev penerapan SOP di lingkup Kemenko Marves dilaksanakan pada Triwulan II (April s.d Juni Tahun 2020), fokus pelaksanaan Monev SOP akan dilakukan pada SOP Makro dan SOP Kementerian.

Pemilihan responden dalam pelaksanaan Monev SOP akan dilakukan secara selektif dari semua unit kerja di lingkungan Kemenko Marves sehingga diharapkan hasilnya dapat meningkatkan nilai/indek RB khususnya pada area Penataan Tata Laksana.

### **3. Sosialisasi Permenko Nomor 4/2020 tentang Pedoman Penyusunan SOP di Lingkungan Kemenko Marves dan Rapat Mekanisme pelaksanaan monev SOP unit kerja di lingkungan Kemenko Marves**

Dengan adanya perubahan nomenklatur dan SOTK baru maka SOP yang sudah ada saat ini agar bisa disesuaikan dengan unit kerja saat ini, selain dari SOP juga ada SOG (Standar Operating Guide) yaitu digunakan saat keadaan Gawat Darurat, tentunya SOG harus berdasarkan pada SOP. File SOP yang ada di Kemenko Marves dapat di unggah; s.id/sopmarves\_roum, s.id/sopmarves\_rokum, s.id/sopmarves\_rorein, s.id/sopmarves\_inspektorat, s.id/sopmarves\_d1, s.id/sopmarves\_d2, s.id/sopmarves\_d3, s.id/sopmarves\_d4.

Sedangkan kuisisioner untuk pelaksanaan Monev SOP terdiri dari 2 (dua) yaitu internal dan stakeholder, selain nanti akan di unggah pada website: maritim.go.id, juga dapat di buka dengan link, Link kuisisioner internal: s.id/monevSOP\_internal, Link kuisisioner stakeholder: s.id/monevSOP\_stakeholder.

## **3. 19 Pengelolaan Reformasi Birokrasi**

### **1. Tindaklanjut Rencana Aksi Pelaksanaan Percepatan Reformasi Birokrasi dalam rangka Peyetaraan Tunkin 80%**

Kegiatan ini bertujuan untuk permintaan masukkan rencana aksi akselerasi pelaksanaan percepatan RB Kemenko Marves dari masing-masing unit kerja Eselon I perihal penyelesaian pekerjaan sesuai timeline yang sudah disepakati bersama. Biro Hukum dan Inspektorat akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Kementerian PANRB untuk mekanisme pemantauan Renaksi, PMPRB dan PMPZI.

## **3. 20 Pengawasan Akuntabilitas Aparatur**

### **1. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Dokumen Pengawasan**

Konsep SOP Peminjaman Dokumen Pengawasan adalah:

- a. Peminjam mengajukan Surat Permintaan Peminjaman Dokumen Pengawasan. Tahap ini memerlukan kelengkapan Konsep Surat Permintaan Peminjaman dan Alat Tulis Kantor (ATK), membutuhkan waktu 1 menit, dan menghasilkan output Surat Permintaan Peminjaman;

- b. Kepala Subbagian Tata Usaha menyetujui atau tidak menyetujui peminjaman dokumen pengawasan. Jika setuju maka memerintahkan Staf Tata Usaha (TU) untuk mencatat dokumen yang dipinjam di Kartu Daftar Peminjaman, menyiapkan dokumen yang akan dipinjam, dan membuat tanda terima dokumen. Tahap ini memerlukan kelengkapan Surat Permintaan Peminjaman dan ATK, membutuhkan waktu 15 menit, dan menghasilkan output Surat Permintaan Peminjaman. Data Peminjam Dokumen bersifat rahasia untuk mengurangi risiko dari pelaksanaan SOP ini;
- c. Staf TU mencatat dokumen yang dipinjam di Kartu Daftar Peminjaman, menyiapkan dokumen yang akan dipinjam, dan membuat tanda terima dokumen. Tahap ini memerlukan kelengkapan ATK dan Komputer, membutuhkan waktu 30 menit, dan menghasilkan output Kartu Daftar Peminjaman, dokumen yang dipinjam, dan Tanda Terima Dokumen. Tanda Terima Dokumen dapat berupa Nota Dinas, Surat Tanda Terima, ataupun Buku Ekspedisi;
- d. Peminjam menerima dokumen yang dipinjam dan menerima tanda terima dokumen. Tahap ini memerlukan kelengkapan ATK dan Komputer, membutuhkan waktu 10 menit, dan menghasilkan output dokumen pengawasan dan Tanda Terima Dokumen. Dokumen boleh dipinjam selama 5 hari kerja. Jika dalam waktu 5 hari belum dikembalikan, maka akan diberikan surat peringatan untuk pengembalian dokumen atau mengajukan permohonan perpanjangan peminjaman. Selama dokumen dipinjam, peminjam harus bertanggung jawab terhadap dokumen tersebut;
- e. Peminjam mengembalikan dokumen dan menyerahkan Tanda Terima Pengembalian Dokumen kepada Kepala Subbagian Tata Usaha. Tahap ini memerlukan kelengkapan ATK dan Komputer, membutuhkan waktu 30 menit, dan menghasilkan output dokumen pengawasan dan Tanda Terima Pengembalian Dokumen. Tanda Terima Dokumen dapat berupa Nota Dinas, Surat Tanda Terima, ataupun Buku Ekspedisi;
- f. Staf TU mencatat mengembalikan dokumen pada Kartu Daftar Peminjaman dan mengembalikan dokumen ke dalam lemari arsip sesuai dengan nomor Binder. Tahap ini memerlukan kelengkapan Kunci lemari, Kartu Daftar Peminjaman, dan dokumen pengawasan dan membutuhkan waktu 30 menit.

Tindak lanjut:

Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Dokumen Pengawasan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut untuk di sempurnakan

## **2. Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran**

Konsep SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran adalah:

- a. Inspektur menerima informasi Pagu Indikatif Inspektorat kemudian memerintahkan Kepala Subbagian Tata Usaha untuk menyusun Rencana

- Kerja dan Anggaran (RKA-K/L) Inspektorat. Tahap ini memerlukan waktu 15 menit dan menghasilkan output Data Informasi Pagu Indikatif;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha memerintahkan Staf (Staf Pengelola Keuangan dan Operator) untuk menyusun RKA Inspektorat. Tahap ini memerlukan waktu 15 menit.
  - c. Staf mempersiapkan data dan informasi Kinerja bersumber dari Rencana Kerja Inspektorat, Usulan Program Kerja Pengawasan Tahunan (UPKPT), dan Realisasi 2 tahun sebelumnya. Tahap ini memerlukan waktu 480 menit dan menghasilkan output RKA Pagu Indikatif dan Data Dukung;
  - d. Staf menyusun Draft RKA Inspektorat beserta Term of Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK) Inspektorat dan mengacu pada Standar Biaya Masukan. Tahap ini memerlukan waktu 960 menit dan menghasilkan Draft RKA-K/L Pagu Indikatif dan Data Dukung;
  - e. Staf membahas Draft Rencana Anggaran Kegiatan Bersama dengan seluruh pegawai Inspektorat. Tahap ini memerlukan waktu 480 menit;
  - f. Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun kembali Draft RKA-K/L beserta data dukungannya sesuai dengan hasil pembahasan. Apabila disetujui maka akan diserahkan kepada Inspektur. Apabila tidak disetujui maka akan dibahas kembali Bersama dengan seluruh pegawai Inspektorat. Tahap ini memerlukan waktu 240 menit dan menghasilkan output RKA-K/L Pagu Indikatif dan Data Dukung;
  - g. Kepala Subbagian Tata Usaha mengusulkan Draft RKA-K/L beserta data dukungannya kepada Inspektur. Apabila disetujui oleh Inspektur maka akan diserahkan kepada Staf. Apabila tidak disetujui oleh Inspektur maka akan dikembalikan kepada Kepala Subbagian Tata Usaha untuk diperbaiki. Tahap ini memerlukan waktu 30 menit dan menghasilkan output RKA-K/L Pagu Indikatif dan Data Dukung;
  - h. Staf mengirimkan usulan anggaran ke Biro Perencanaan untuk ditelaah secara paralel oleh Pejabat Fungsional Auditor. Tahap ini memerlukan waktu 30 menit dan menghasilkan output RKA-K/L Pagu Indikatif dan Data Dukung.

Tindak lanjut:

Konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Peminjaman Dokumen Pengawasan selanjutnya akan dibahas lebih lanjut untuk di sempurnakan.

### **3. Pemantauan Pengaduan Masyarakat**

Pengaduan Masyarakat akan dinilai tersendiri pada Penilaian Reformasi Birokrasi. Yang menjadi unsur yang ditekankan pada Pengaduan Masyarakat adalah Standar Prosedur Operasional (SOP) dan kebijakan Monitoring dan SOP Evaluasi. *Evidence* atau bukti atas pelaksanaan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ini akan diambil dari pengaduan yang ada pada Bagian Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat pada Biro Perencanaan dan Informasi sebagai inisiator dari Konsep Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Kebijakan Pengaduan Masyarakat ini.

Inspektorat harus memastikan Pengaduan Masyarakat tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Unit Kerja yang terkait dengan Pengaduan Masyarakat tersebut. Hal lain yang harus diperhatikan dalam Monitoring oleh Biro Hukum dan Evaluasi oleh Inspektorat, Pengaduan Masyarakat adalah jumlah Pengaduan Masyarakat yang sudah ditindaklanjuti dalam bentuk jawaban dan tindakan yang dapat dilakukan atas Pengaduan Masyarakat tersebut, serta jumlah Pengaduan Masyarakat yang diteruskan kepada Kementerian atau Lembaga lainnya untuk ditindaklanjuti.

Selain dalam bentuk online yang disampaikan melalui aplikasi PeSAN, ada Pengaduan Masyarakat yang disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang didisposisikan kepada Unit Kerja Kedeputian yang terkait dengan Pengaduan Masyarakat tersebut. Maka itu, perlu mengatur Unit Kerja di dalam Unit Kerja Kedeputian tersebut yang bertanggung jawab atas Pengaduan Masyarakat yang terkait dengan Unit Kerja Kedeputian tersebut. Ini perlu dipertimbangkan dalam membuat Kebijakan terkait Pengaduan Masyarakat.

Kebijakan terkait Pengaduan Masyarakat dibuat dalam bentuk Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan akan terus diperbaharui sesuai kebijakan-kebijakan lain yang terkait dan mengikat mengenai Pengaduan Masyarakat.

Tindak Lanjut :

- a. Pembuatan Surat Tugas Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat ini akan dibuat dengan memperhatikan formasi penugasan pada Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat tahun sebelumnya.
- b. Pengaduan Masyarakat telah dipantau, ditindaklanjuti, dan ditatausahakan namun masih perlu inovasi

### **3. 21 Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional**

#### **1. Risalah Kebijakan mengenai Pengelolaan Pengetahuan/Kearifan Lokal Sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK)**

Staf Ahli Bidang Sosio Antropologi mengeluarkan risalah kebijakan mengenai pengelolaan pengetahuan atau kearifan lokal sebagai Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dalam mendukung Pembangunan Sektor Parekraf dengan ringkasan sebagai berikut: Pengetahuan tradisi (*traditional knowledge*) dan kearifan lokal (*local wisdom*) telah dicanangkan dalam pengarusutamaan modal sosial budaya bagi pembangunan nasional jangka menengah 2020-2024. Pengarusutamaan ini bertujuan mendorong penguatan hak kekayaan intelektual, terutama kekayaan intelektual yang bersifat komunal (KIK) dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi kreatif untuk mendukung strategi transformasi ekonomi di sektor penguatan ekonomi kreatif dan ekonomi digital. Kolaborasi/kemitraan multi pihak, sistem pengelolaan pengetahuan/kearifan

lokal serta pengembangan lokasi percontohan sebagai *showcase* model penguatan ekosistem dan kelembagaan HKI merupakan aksi-aksi strategis yang direkomendasikan untuk segera direalisasikan dalam jangka pendek (TA 2020). Sedangkan untuk jangka menengah (TA 2021 – 2024), perlu ditentukan indikator kinerja beserta target-target yang terukur agar pola koordinasi dan model kolaborasi semakin fokus serta tepat sasaran, sesuai dengan program prioritas (ProP) RPJMN 2020-2024.

## IV. DUKUNGAN SUMBER DAYA

Adapun Realisasi Keuangan pada bulan April Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dari tiga Biro dan Inspektorat Berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu Kementerian Keuangan (*SMART*) adalah sebagai berikut:

KODE	PROGRAM	PAGU	REALISASI	PERSENTASE
5601	Penyelenggaraan Pelayanan Umum Perkantoran serta Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya	137.792.027.000	7.518.051.855	5,46 %
5602	Penyusunan Rencana, Program, Anggaran, Akuntabilitas Kinerja, Persidangan, Sistem Informasi dan Hubungan Masyarakat	22.785.367.000	517.318.226	2,27 %
5603	Pengelolaan Hukum, Advokasi, Kerja Sama dan Organisasi	6.830.796.000	146.233.600	2,14 %
5604	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Kemenko Bidang Kemaritiman	3.690.000.000	46.462.899	1,26 %
5748	Penguatan dan Penataan Regulasi dan Kelembagaan Kemaritiman Nasional	1.243.454.000	12.078.000	0,97 %
TOTAL		172.341.644.000	8.240.144.580	4,78 %

Tabel 9 Realisasi Keuangan

Melalui tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase realisasi anggaran Sekretariat dan Inspektorat pada periode bulan April 2020 adalah **4,78%**. Realisasi ini lebih kecil **1,64%** dibanding pada bulan Maret 2020 yaitu (**6,42%**). Pada tabel di atas terlihat bahwa Biro (unit kerja) dengan nilai persentase realisasi anggaran berdasarkan pagu terbesar adalah Biro Umum (**5,46%**). Sementara bagian dengan nilai realisasi terkecil berdasarkan pagu terkecil adalah Staf Ahli Menteri (**0,97%**). Untuk periode bulan berikutnya diharapkan pandemi Covid-19 segera berakhir agar nilai persentase realisasi dapat ditingkatkan yang diikuti dengan terealisasinya kegiatan yang sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran 2020.

## V. PENUTUP

Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan pada Semester I tahun 2020 yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di lingkup Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi yang meliputi Biro Umum, Biro Perencanaan dan Informasi, Biro Hukum, Staf Ahli Menteri serta capaian kinerja Inspektorat.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai capaian pelaksanaan kegiatan Sekretariat Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang, beberapa aktivitas kegiatan telah dilakukan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.